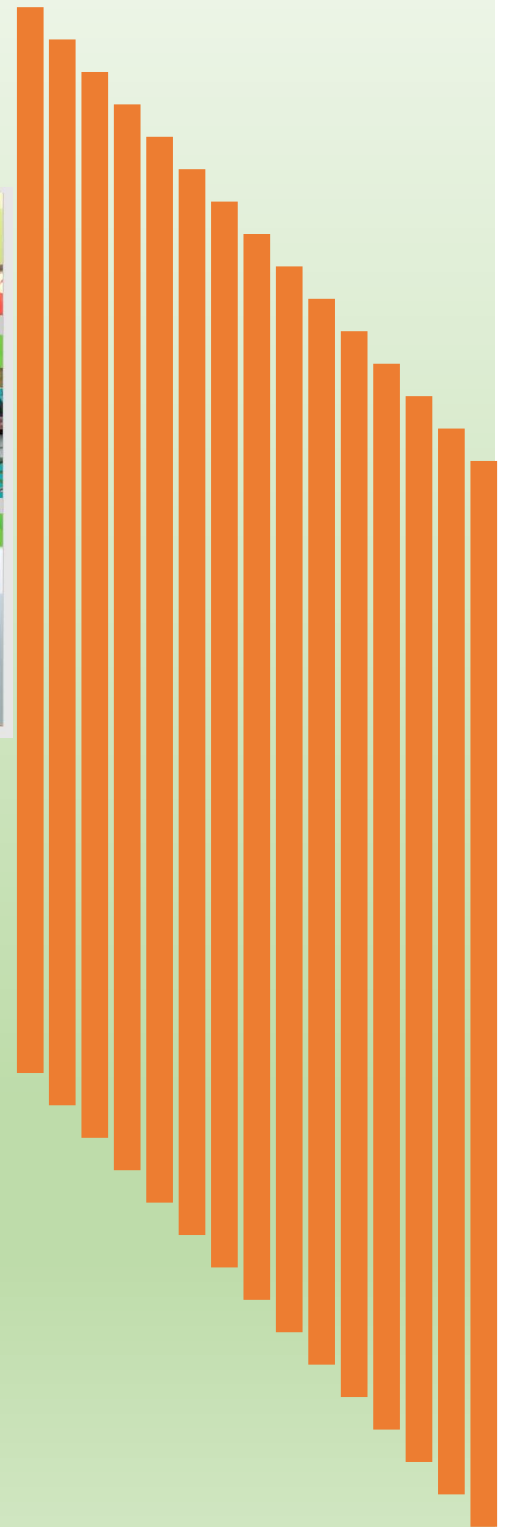




LKIP RSUD KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2023



Kata Pengantar

Penyusunan LKIP Tahun 2023 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Kota Yogyakarta atas pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Rencana Kerja (Renja) 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat capaian kinerja sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja, sebagai acuan penyusunan program/kegiatan dan alokasi anggaran di tahun-tahun selanjutnya, dan sebagai tolok ukur target pencapaian kinerja serta mensinergikan kegiatan pada setiap bidang di RSUD Kota Yogyakarta dan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta demi tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis RSUD Kota Yogyakarta yang menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Yogyakarta.

Penyusunan LKIP RSUD Kota Yogyakarta ini telah diupayakan sebaik mungkin, namun demikian kami menyadari masih terdapat kekurangan dikarenakan adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan hal tersebut akan senantiasa diupayakan lebih baik lagi di tahun berikutnya. Kami harap penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 31 Januari 2024

Direktur RSUD Kota

Yogyakarta


dr. Ariyudi Yunta, MMR

NIP. 



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 berisi gambaran umum dan kondisi riil capaian kinerja RSUD Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unit organisasi yang bersifat khusus dibawah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang memiliki peran sebagai pendukung urusan perangkat daerah di bidang pelayanan kesehatan. Dalam laporan ini disampaikan juga mengenai Perencanaan Kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 sebagai wujud proses awal dalam menyusun anggaran dan rencana kinerja; yang kemudian dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja serta dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Tahapan berikutnya setelah implementasi dari pelaksanaan anggaran sebagaimana Perjanjian Kinerja yang ditetapkan adalah proses Akuntabilitas Kinerja, yang menjelaskan capaian sekaligus evaluasi kinerja serta realisasi anggaran Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta, RSUD Kota Yogyakarta tahun 2023 menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan 2 (dua) indikator kinerja utama. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi RSUD Kota Yogyakarta. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A	100%
Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Hasil Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	100%

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2023 telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Kemudian guna menunjang pencapaian sasaran strategis diatas, maka disusunlah program dan kegiatan RSUD Kota Yogyakarta selama kurun waktu tahun 2023, yang terdiri dari 2 (dua) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan 5 (lima) indikator program yaitu:

1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat
2. Persentase pendapatan BLUD rumah sakit
3. Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasikan secara optimal
4. Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS
5. Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi RSUD Kota Yogyakarta ke depan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sistem pelayanan KRIS (Kelas Rawat Inap Standar);
2. Sistem pelayanan kesehatan yang menunjang 10 layanan prioritas;
3. Sistem pelayanan kesehatan berjenjang;
4. Pengembangan Rumah Sakit guna meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah sesuai dengan Master Plan yang telah disusun;

Selanjutnya, untuk mendukung capaian kinerja yang diharapkan tersebut, RSUD Kota Yogyakarta juga telah melakukan inovasi dalam pelayanan pengantaran obat bagi para pasien yaitu dengan adanya inovasi OTEWE MASJO (Obat Teko Dewe Rumah Sakit Jogja) yang diluncurkan pada bulan November 2023.

Selain inovasi yang dibuat, RSUD Kota Yogyakarta juga meraih beberapa capaian dengan mendapatkan penghargaan diantaranya sebagai berikut:

1. Pemenang Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas dan RS di DIY Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Prov DIY untuk Adriyanto Rochmad Basuki, S.Far., Apt., M.Farm dan Dafik Ya`Lu Ulinnuha, S.Kep., Ns;
2. Juara 1 Umum Gerak Jalan POR KORPRI Kota Yogyakarta tahun 2023;
3. Juara 2 National Dialysis Education Competition ;
4. Prestasi Nominasi Terbaik Pelaporan Indikator Mutu RS Kelas B Tahun 2023 di DIY;
5. Penghargaan E Poster Award Korean Society Of Heart Failure (KSHF and CTC Asia 2023 Korsel untuk dr. Tyas Pramitasari dan dr. Sabila Fatimah;
6. Juara Pertama Lomba Senam Kreasi Hari Kesehatan Nasional ke 59 tingkat Unit Layanan Kesehatan Pemerintah Kota Yogyakarta;
7. Pemenang lomba karaoke kategori OPD Kota Yogyakarta;
8. Pemenang Gender Champion 2023 Aprilya Dewi Kartika Sari, M.Psi.,Psikolog
9. Juara 3 Lomba Bakiak Putri (memperingati hari jadi korpri ke 52)

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan selama kurun waktu tahun 2023, RSUD Kota Yogyakarta telah mampu meningkatkan kepercayaan Masyarakat pengguna layanan kesehatan di Kota Yogyakarta dan sekitarnya yang ditunjukkan dengan peningkatan capaian nilai Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebanyak 5,7 point yang dihitung dari capaian tahun 2022 sebesar (81,64) dan capaian tahun 2023 sebesar (87,43). Dari hal tersebut RSUD Kota Yogyakarta diharapkan mampu untuk dapat selalu meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan di Kota Yogyakarta dan sekitarnya guna menunjang visi, misi dan sasaran Pemerintah Kota Yogyakarta.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 ini sangat penting untuk dipergunakan sebagai acuan bagi RSUD Kota Yogyakarta dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang, sehingga hasil yang telah diraih selama ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	vii
Daftar Grafik	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. SUSUNAN ORGANISASI	1
B. TUGAS DAN FUNGSI	2
C. ISU-ISU STRATEGIS	3
D. KONDISI PEGAWAI	4
E. KONDISI SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN	7
F. KEADAAN KEUANGAN.....	8
G. SISTEMATIKA LKIP 2023	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. PERENCANAAN STRATEGIS	13
1. Visi Dan Misi Kepala Daerah	14
2. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah	14
3. Strategi, Program Dan Kegiatan	17
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	19
C. RENCANA ANGGARAN.....	19
1. Target Belanja	19
2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	24
1. Capaian Sasaran Strategis	24
2. Capaian Indikator Program	30
3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dan 2023.....	32
4. Capaian Kinerja Pelayanan	34
5. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional Atau Yang Sejenis.....	36
6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.....	37
7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	39

8. Analisis Program/Kegiatan terkait dengan Pengarus Utamaan Gender.....	40
9. Inovasi Tahun 2023	40
10. Penghargaan Yang Diraih	41
11. Kolaborasi Lintas Sektor Yang Mendukung Pencapaian Kinerja	41
B. REALISASI ANGGARAN.....	42
BAB IV PENUTUP	46
LAMPIRAN	- 48 -

Daftar Tabel

- Tabel 1. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023
- Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2026
- Tabel 3. Strategi, Program Dan Kegiatan
- Tabel 4. Indikator Program Tahun 2023
- Tabel 5. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023
- Tabel 6. Target Fisik dan Keuangan Perubahan Tahun 2023
- Tabel 7. Alokasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2023
- Tabel 8. Pencapaian Kinerja Tahunan RSUD Kota Yogyakarta
- Tabel 9. Hasil Penilaian PMPRB Tahun 2022
- Tabel 10. Capaian Kinerja Program Tahun 2023
- Tabel 11. Capaian Realisasi Program Tahun 2022 dan 2023
- Tabel 12. Hasil Survei IKM Tahun 2023
- Tabel 13. Data Akreditasi Rumah Sakit Kelas B Kota Yogyakarta
- Tabel 14. Data Akreditasi Rumah Sakit Kelas B Provinsi DIY
- Tabel 15. Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2023

Daftar Gambar

- Gambar 1. Anggaran Total dan Rincian Belanja Tahun 2023

Daftar Grafik

- Grafik 1. Capaian Nilai IKM Per Instalasi Semester 2 Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini sebagai perwujudan dari implementasi akuntabilitas instansi pemerintah untuk mendukung terwujudnya sistem pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan, RSUD Kota Yogyakarta sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, maka LKIP RSUD Kota Yogyakarta ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari LKIP Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

A. SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan, susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri atas:
 1. Bidang Pelayanan Medis;
 2. Bidang Keperawatan; dan

3. Bidang Pelayanan Penunjang.
- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri atas:
 1. Bagian Umum, terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
 2. Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, terdiri atas Subbagian Keuangan dan Akuntansi.
- d. Satuan Pemeriksaan Internal;
- e. Komite Medis;
- f. Komite Lain; dan
- g. Unit Kerja Fungsional.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta disebutkan bahwa Pada Dinas Kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas, terdapat rumah sakit sebagai unit organisasi bersifat khusus dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional. Untuk selanjutnya tugas pokok, fungsi, kedudukan dan struktur organisasi ditetapkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan.

Selain Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023, tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta juga dirumuskan melalui Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta. Tugas pokok dan Fungsi sesuai Perwal Nomor 78 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Tugas

RSUD membantu Walikota dalam:

- a. menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di bidang kesehatan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan
- b. melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan pencegahan penyakit (preventif), upaya peningkatan promosi kesehatan (promotif);
- c. melaksanakan upaya rujukan kesehatan; dan

- d. melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan.

2. Fungsi

RSUD dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi menyelenggarakan:

- a. pelayanan medis paripurna;
- b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. pelayanan rujukan;
- e. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- f. pelayanan penelitian dan pengembangan;
- g. penapisan teknologi bidang kesehatan;
- h. pelayanan administrasi dan keuangan rumah sakit; dan
- i. tugas lain berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Walikota.

C. ISU-ISU STRATEGIS

Perumusan isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga teknis daerah berawal dari adanya hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, hal ini diperlukan dalam penyusunan perencanaan yang akan dituangkan dalam program dan kegiatan. Isu strategis tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Sistem pelayanan kesehatan berjenjang sesuai ketentuan pelaksanaan BPJS dapat membatasi cakupan pelayanan kesehatan (kasus lanjut) RSUD Kota Yogyakarta. Sebagai RS kelas B; pasien BPJS hanya dapat dilayani apabila ada rujukan dari fasilitas kesehatan di bawahnya walaupun secara akses lebih dekat ke RSUD Kota Yogyakarta. Penerapan system P-Care yang dilakukan BPJS Bidang Kesehatan semakin mempersempit akses pasien untuk berobat ke RSUD Kota Yogyakarta karena akan ditapis sesuai sistem yang hanya dapat dilayani oleh RS dengan kelas dibawah RSUD Kota Yogyakarta.
- 2) Sistem pelayanan KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) yang saat ini telah dioperasionalkan di RSUD Kota Yogyakarta untuk uji coba bagi pengguna layanan rawat inap BPJS kelas III. Diharapkan dari Kementerian Kesehatan RI kedepan dapat menyusun regulasi yang jelas mengenai Juknis Pelaksanaan KRIS bagi semua kelas rawat inap BPJS mengingat saat ini yang diatur hanya bagi pengguna layanan BPJS kelas III.
- 3) Sistem pelayanan kesehatan yang menunjang 10 layanan prioritas diantaranya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), pencegahan

dan tindakan penyakit tuberkulosis paru (TBC) serta penyakit katastropik. Dalam rangka transformasi sistem kesehatan sesuai dengan rencana strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2022-2024, serta akselerasi sinergi program rumah sakit jejaring prioritas nasional, RSUD Kota Yogyakarta sebagai salah satu rumah sakit yang tergabung dalam Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Prioritas pada 10 layanan prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia harus mampu meningkatkan kualitas SDM dan sarana, prasarana serta alat kesehatan sebagai RS rujukan terhadap layanan prioritas di wilayah Kota Yogyakarta dan sekitarnya.

- 4) Layout bangunan yang ada saat ini tidak terpadu dan kurang komprehensif, sehingga kurang efisien dan efektif untuk dijangkau baik pengunjung maupun karyawan. Oleh karena itu RSUD Kota Yogyakarta telah menyusun masterplan pembangunan Rumah Sakit pada tahun 2021. Akan tetapi membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang besar untuk mewujudkan layout bangunan seperti masterplan tersebut. Sebagai tahap awal mewujudkan masterplan, pada tahun 2023 ini telah diselesaikan pembangunan tahap 1 berupa gedung untuk instalasi gizi dan gudang farmasi kemudian pada tahun 2024 akan dilakukan pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) dan rehab Gedung eks Instalasi Gizi untuk Instalasi Sterilisasi Sentral (ISS).

D. KONDISI PEGAWAI

Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan sampai dengan 31 Desember 2023 yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023

No.	Jenis	PNS / CPNS	PPPK	JLOP	BLUD	Mitra Penuh Waktu	Paruh Waktu / Konsultan/ Supervisor	Jumlah
	TENAGA KESEHATAN							
A.	<i>Tenaga Medis :</i>	49	2	0	4	4	10	69
1	Dokter Umum	14	1	-	2	1	-	18
2	Dokter Spesialis	28	-	-	2	3	6	39
3	Dokter Sub Spesialis	3	1	-	-	-	4	8
4	Dokter Gigi, termasuk Drg.Sps	4	-	-	-	-	-	4
B.	<i>Tenaga Keperawatan:</i>	222	2	9	40	0	0	273
1	S2 Keperawatan Anak	1	-	-	-	-	-	1
2	S2 Medikal Bedah	1	-	-	-	-	-	1

No.	Jenis	PNS / CPNS	PPPK	JLOP	BLUD	Mitra Penuh Waktu	Paruh Waktu / Konsultan/ Supervisor	Jumlah
3	S2 Medikal Bedah + profesi	1	-	-	-	-	-	1
4	S2 Keperawatan Kritis	1	-	-	-	-	-	1
5	S2 Keperawatan Kronis	1	-	-	-	-	-	1
6	S1 Keperawatan + Ners	59	1	-	12	-	-	72
7	D IV Keperawatan Gadar + Ners	4	-	-	-	-	-	4
8	D IV Keperawatan Bedah + Ners	3	-	-	-	-	-	3
9	D IV Keperawatan Anak + Ners	3	-	-	-	-	-	3
10	DIV Keperawatan Gadar	1	-	-	-	-	-	1
11	DIV Keperawatan Bedah	1	-	-	-	-	-	1
12	D III Keperawatan	146	1	9	28	-	-	184
C.	<u>Tenaga Psikologi Klinis</u>	1	0	0	0	0	0	1
1	S2 Psikologi (Psikolog Klinis)	1	-	-	-	-	-	1
D.	<u>Tenaga Bidan :</u>	27	0	0	3	0	0	30
1	D III Bidan	23	-	-	3	-	-	26
2	DIV Bidan Klinik	4	-	-	-	-	-	4
E.	<u>Tenaga Kefarmasian:</u>	33	1	0	5	0	0	39
1	Apoteker + S2 Farmasi Klinis	2	-	-	-	-	-	2
2	Apoteker	10	1	-	-	-	-	11
3	D III Farmasi	21	-	-	5	-	-	26
F.	<u>Tenaga Kesehatan Masyarakat:</u>	6	0	0	2	0	0	8
1	DIV Keperawatan	1	-	-	-	-	-	1
2	S1 Kesehatan Masyarakat (Kesling)	1	-	-	-	-	-	1
3	D III Kesehatan Lingkungan	4	-	-	2	-	-	6
G.	<u>Tenaga Gizi/Dietisien:</u>	9	0	0	1	0	0	10
1	S1 Gizi	1	-	-	-	-	-	1
2	D IV Gizi	1	-	-	-	-	-	1
3	D III Gizi	7	-	-	1	-	-	8
H.	<u>Tenaga Keterampilan Fisik:</u>	8	0	2	0	0	0	10
1	D IV Fisioterapi	3	-	-	-	-	-	3
2	D III Fisioterapi	2	-	-	-	-	-	2
3	D III Okupasi Terapi	1	-	1	-	-	-	2
4	D III Terapi Wicara	2	-	-	-	-	-	2
5	DIII Akupuntur	-	-	1	-	-	-	1

No.	Jenis	PNS / CPNS	PPPK	JLOP	BLUD	Mitra Penuh Waktu	Paruh Waktu / Konsultan/ Supervisor	Jumlah
I.	<u>Tenaga Ketechnisian Medis:</u>	27	0	2	12	0	0	41
1	D III Perekam Medis	19	-	1	7	-	-	27
2	D1 Teknisi Transfusi Darah	-	-	-	5	-	-	5
3	D III Perawat Gigi	4	-	-	-	-	-	4
4	D IV Keperawatan Anestesi	3	-	1	-	-	-	4
5	D III Anesthesi	1	-	-	-	-	-	1
J.	<u>Tenaga Teknis Biomedika:</u>	28	1	4	4	0	0	37
1	D IV Teknik Radiologi	2	-	-	-	-	-	2
2	D IV Teknologi Nuklir	1	-	-	-	-	-	1
3	D III Teknik Radiologi	3	-	3	1	-	-	7
4	SI Teknik	2	-	-	-	-	-	2
5	D III Teknik Elektromedik	2	-	-	-	-	-	2
6	D IV Analisis Kesehatan Laboratorium	2	-	-	-	-	-	2
7	D III Analisis Kesehatan Laboratorium	15	1	-	3	-	-	19
8	S1 Fisikawan Medik	1	-	1	-	-	-	2
9	D III Ortotis Prostesis	-	-	-	-	-	-	0
	TENAGA NON KESEHATAN DAN STRUKTURAL	52	0	45	94	0	0	191
1	S2 Manajemen	1	-	-	-	-	-	1
2	Dokter Umum	2	-	-	-	-	-	2
3	S2 Kesehatan	1	-	-	-	-	-	1
4	S2 Ekonomi Pembangunan	1	-	-	-	-	-	1
5	S2 Akuntansi	1	-	-	-	-	-	1
6	S2 Administrasi Publik (MAP)	1	-	-	-	-	-	1
7	S2 Asuransi Kesehatan	1	-	-	-	-	-	1
8	S2 Promosi Kesehatan	1	-	-	-	-	-	1
9	S2 Manajemen Rumah Sakit	2	-	-	-	-	-	2
10	S2 Hukum Kesehatan	1	-	-	-	-	-	1
11	S1 Ekonomi Manajemen	-	-	-	2	-	-	2
12	S1 Akuntansi	1	-	-	-	-	-	1
13	S1 Pendidikan Akuntansi	-	-	-	1	-	-	1
14	S1 Ekonomi	-	-	-	1	-	-	1
15	S1 Teknik Informatika	4	-	-	2	-	-	6
16	S1 Hukum	1	-	-	2	-	-	3

No.	Jenis	PNS / CPNS	PPPK	JLOP	BLUD	Mitra Penuh Waktu	Paruh Waktu / Konsultan/ Supervisor	Jumlah
17	S1 Psikologi	-	-	1	-	-	-	1
18	S1 Kesehatan Masyarakat	3	-	-	4	-	-	7
19	S1 Komunikasi	-	-	-	3	-	-	3
20	Apoteker	-	-	1	2	-	-	3
21	D IV Teknologi Nuklir	1	-	-	-	-	-	1
22	D III Akuntansi	2	-	-	3	-	-	5
23	D III Manajemen	-	-	1	2	-	-	3
24	D III Kesejahteraan Sosial	1	-	-	-	-	-	1
25	D III Keperawatan	1	-	-	-	-	-	1
26	D III Boga	1	-	-	-	-	-	1
27	D III Teknik Elektro	-	-	1	-	-	-	1
28	D III Farmasi	-	-	2	4	-	-	6
29	D III Kebidanan	-	-	1	1	-	-	2
30	D III Gizi	-	-	-	3	-	-	3
31	D1 Administrasi Rumah Sakit	-	-	1	-	-	-	1
32	SPK	1	-	-	-	-	-	1
33	SMF	1	-	-	-	-	-	1
34	SLTA	7	-	19	30	-	-	56
35	SMK	7	-	12	33	-	-	52
36	SLTP	8	-	4	1	-	-	13
37	SD	1	-	2	-	-	-	3
Jumlah		462	6	62	165	4	10	709

Sumber Data : Sub Bag Kepegawaian RS Jogja, Desember 2023

E. KONDISI SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta selalu berupaya untuk meningkatkan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit. Rencana pemenuhan secara bertahap sarana, prasarana dan alat kesehatan dituangkan dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) Tahun 2023-2026.

Kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki RSUD Kota Yogyakarta sampai dengan bulan Desember 2023 dapat dilihat dari data yang telah dientry pada aplikasi SIMBADA dan dirangkum oleh Bagian Pelayanan Medis serta Instalasi Pemeliharaan Alat Medis (IPAM). Capaian Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat

dioperasionalkan secara optimal yang dimiliki oleh RSUD Kota Yogyakarta pada tahun 2023 adalah sebesar 80,97%.

F. KEADAAN KEUANGAN

Agar Rumah Sakit dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik diperlukan alokasi anggaran yang tepat, anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan RSUD Kota Yogyakarta tahun 2023 berasal dari sumber dana APBD dan BLUD. Total belanja anggaran perubahan tahun 2023 sebesar Rp.179.614.070.509,- yang terdiri atas belanja operasi Rp.134.207.914.509,- dan belanja modal sebesar Rp.45.406.156.000,-. Berikut hasil unduh dokumen dari aplikasi SIPD pada perubahan tahun 2023:

Gambar 1.
Anggaran Total dan Rincian Belanja Tahun 2023

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPPA-BELANJA SKPD										
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023																				
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.02.0.00.0.00.01.0022/001/2023																				
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																				
Sub Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																				
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																				
1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pajak Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan		5.890.000	0	0	0	5.890.000	5.890.000	0	0	0	5.890.000	0	0
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.736.000	0	0	0	5.736.000	5.736.000	0	0	0	5.736.000	0	0
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Pajak Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan		5.736.000	0	0	0	5.736.000	5.736.000	0	0	0	5.736.000	0	0
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah				3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0
1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pajak Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan		3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				393.455.610	55.000.000	0	0	448.455.610	393.455.610	30.000.000	0	0	423.455.610	(25.000.000)	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pajak Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan		199.810.000	0	0	0	199.810.000	199.810.000	0	0	0	199.810.000	0	0
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pajak Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan		193.645.610	55.000.000	0	0	248.645.610	193.645.610	30.000.000	0	0	223.645.610	(25.000.000)	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7.985.964.000	0	0	0	7.985.964.000	7.737.860.000	0	0	0	7.737.860.000	(248.104.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
1	2	3	4	5				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21					
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pajak Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan		2.671.200.000	0	0	0	2.671.200.000	2.401.200.000	0	0	0	2.401.200.000	(270.000.000)	
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pajak Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan		5.314.764.000	0	0	0	5.314.764.000	5.336.660.000	0	0	0	5.336.660.000	21.896.000	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.051.917.500	0	0	0	2.051.917.500	1.896.330.000	0	0	0	1.896.330.000	(155.587.500)		
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan		40.935.500	0	0	0	40.935.500	33.360.000	0	0	0	33.360.000	(7.575.500)	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan		88.982.000	0	0	0	88.982.000	62.970.000	0	0	0	62.970.000	(26.012.000)	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pajak Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan		120.000.000	0	0	0	120.000.000	120.000.000	0	0	0	120.000.000	0	
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pajak Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan		1.802.000.000	0	0	0	1.802.000.000	1.680.000.000	0	0	0	1.680.000.000	(122.000.000)	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			85.115.384.520	10.900.000.000	0	0	96.015.384.520	106.999.633.299	26.250.000.000	0	0	133.249.633.299	37.234.248.779		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan		85.115.384.520	10.900.000.000	0	0	96.015.384.520	106.999.633.299	26.250.000.000	0	0	133.249.633.299	37.234.248.779	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			19.637.009.600	14.583.156.000	0	0	34.220.165.600	17.166.009.600	19.126.156.000	0	0	36.292.165.600	2.072.000.000		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			19.587.009.600	14.258.156.000	0	0	33.845.165.600	17.116.009.600	18.525.156.000	0	0	35.641.165.600	1.796.000.000		
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Pajak Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan		0	200.000.000	0	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0	200.000.000	0	
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pajak Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan		0	6.600.000.000	0	0	6.600.000.000	0	4.772.000.000	0	0	4.772.000.000	(1.828.000.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah														
1	2	3	4	5				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)				
10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21											
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan; Pajak Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan		0	7.458.156.000	0	0	0	7.458.156.000	0	13.553.156.000	0	0	0	13.553.156.000	6.095.000.000	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Pajak Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan		9.587.009.600	0	0	0	9.587.009.600	7.087.009.600	0	0	0	0	7.087.009.600	(2.500.000.000)		
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Pajak Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan		7.500.000.000	0	0	0	7.500.000.000	7.500.000.000	0	0	0	0	7.500.000.000	0		
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pajak Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan		2.500.000.000	0	0	0	2.500.000.000	2.529.000.000	0	0	0	0	2.529.000.000	29.000.000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0		
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Pajak Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan		50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0		
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				0	325.000.000	0	0	325.000.000	0	601.000.000	0	0	0	601.000.000	276.000.000		
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Pajak Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan		0	325.000.000	0	0	325.000.000	0	601.000.000	0	0	0	601.000.000	276.000.000		

G. SISTEMATIKA LKIP 2023

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSUD Kota Yogyakarta tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan langkah-langkah dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan disebutkan pula langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada.

- BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP dan manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Keadaan Pegawai, Keadaan Sarana Prasarana, Keadaan Keuangan dan Sistematika penulisan LKIP RSUD Kota Yogyakarta.

- BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab 2 ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih pada tahun 2023 serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab 3 ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Selain itu juga dicantumkan Inovasi dan penghargaan yang berhasil diraih pada tahun 2023. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

- BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi Kesimpulan, Rencana Tindak Lanjut, dan pemanfaatan laporan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis RSUD Kota Yogyakarta disusun sebagai komitmen Rumah Sakit dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Dokumen Perencanaan Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi: kebijakan, program dan kegiatan beserta target yang ingin dicapai untuk memudahkan pengukuran dan evaluasi atas kinerja yang telah disusun. Perencanaan strategis Kota Yogyakarta ini selanjutnya menjadi dasar dalam pembuatan Rencana Startegis RSUD Kota Yogyakarta yang kemudian disebut dengan RSB (Rencana Strategis Bisnis) Tahun 2023-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUD Kota Yogyakarta telah melalui beberapa tahapan koordinasi perencanaan baik di tingkat internal RSUD maupun koordinasi bersama tim di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok RSUD Kota Yogyakarta di bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Dari Rencana Strategis Bisnis tersebut dijabarkan kembali dalam perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan). Penyusunan Rencana Kerja RSUD Kota Yogyakarta bertujuan untuk membuat dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan sebagai arah dan acuan dalam kebijakan pembangunan kesehatan dalam 1 tahun anggaran.

Pada tahun 2021 dilakukan penyesuaian program dengan nomenklatur program dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

1. Visi Dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, dan isu strategis aktual. Visi Walikota Yogyakarta yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yaitu “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”. Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan sembilan misi pembangunan yaitu:

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat

Tugas pokok dan fungsi RSUD Kota Yogyakarta adalah untuk mendukung misi ke sembilan yaitu ‘Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat’ dan sasaran pendukung yaitu “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”.

2. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Untuk mendukung terwujudnya misi ke sembilan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan tujuan Rumah Sakit yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sebagai berikut:

- VISI
“Terwujudnya Rumah Sakit Pilihan Masyarakat dan Wahana Pendidikan Berkompeten”
- MISI
 - a. Mewujudkan pelayanan rumah sakit secara paripurna berbasis keselamatan pasien;
 - b. Menerapkan sistem manajemen berbasis teknologi informasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - c. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar; dan
 - d. Mewujudkan rumah sakit sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pengembangan.
- TUJUAN STRATEGIS :
 - a. Terciptanya Rumah Sakit sebagai rumah sakit dambaan masyarakat;
 - b. Terciptanya Rumah Sakit yang aman dan nyaman;
 - c. Meningkatnya mutu pelayanan medis sesuai standar;
 - d. Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten;
 - e. Tersedianya peralatan medis dan non medis sesuai standar; dan
 - f. Tersedianya sistem informasi dan manajemen rumah sakit yang handal.
- INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran. Penetapan IKU bertujuan untuk menentukan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang disusun dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta akuntabilitas kinerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta. IKU RSUD Kota Yogyakarta sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

Tabel 2
Indikator Kinerja Utama
Tahun 2023-2026

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
1	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Skor Akreditasi RS	Hasil Penilaian Akreditasi RS yang dilakukan oleh KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit)	<p>Skor Akreditasi RS dihitung dari Hasil Akreditasi Paripurna dari Standar Akreditasi Rumah Sakit Kemenkes RI (STARKES) yang terdiri dari 4 kelompok penilaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok Manajemen Rumah Sakit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS) b. Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS) c. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) d. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) e. Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (MRMIK) f. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) g. Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan (PPK) 2. Kelompok Pelayanan Berfokus pada Pasien terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Akses dan Kontinuitas Pelayanan (AKP) b. Hak pasien dan Keluarga (HPK) c. Pengkajian Pasien (PP) d. Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP) e. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB) f. Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO) g. Komunikasi dan Edukasi (KE) 3. Kelompok Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) 4. Kelompok Program Nasional (PROGNAS)
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat

Berdasarkan tabel diatas, untuk dapat mengetahui terwujudnya pelayanan Rumah Sakit yang bermutu dan terjangkau, IKU yang ditetapkan berupa Skor Akreditasi RS dan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Target yang ditetapkan dalam IKU untuk tahun 2023 adalah Lulus Akreditasi Paripurna dan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dengan kategori nilai A (point >80-90).

3. Strategi, Program Dan Kegiatan

Strategi merupakan aturan atau arahan untuk mencapai misi dan tujuan yang meliputi kegiatan secara keseluruhan yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah. Strategi RSUD Kota Yogyakarta didukung oleh program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka nomenklatur untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 3.
Strategi, Program Dan Kegiatan

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
MENINGKATNYA REFORMASI BIROKRASI RSUD KOTA YOGYAKARTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
		4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
		3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
STANDAR PELAYANAN RS BERBASIS MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN MENINGKAT			4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		7. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	1. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	1. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
			2. Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			3. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			4. Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin
			5. Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai
			6. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
	3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan jaringan Internet	

Sedangkan untuk indikator program tahun 2023 seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.
Indikator Program Tahun 2023

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN 2023
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80-90)
		Presentase pendapatan BLUD rumah sakit	100%
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal	80,25 %
		Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	80%
		Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan	80%

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja Direktur RSUD Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta disusun pada awal tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Perjanjian Kinerja yang disusun mengacu pada RPJMD, IKU, dan DPA perangkat daerah. Perjanjian Kinerja tahun 2023 RSUD Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 5.
Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Standar Pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Hasil Akreditasi Paripurna	Lulus Akreditasi Paripurna
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A

Indikator Kinerja yang digunakan dalam Perjanjian Kinerja adalah Hasil Akreditasi Paripurna yang merupakan indikator yang ditetapkan sebagai IKU sehingga hasil pencapaian IKU juga dimanfaatkan dalam hasil Penilaian Kinerja. Pada bulan Oktober 2023 dilakukan perubahan anggaran sehingga perjanjian kinerja juga mengalami perubahan. Akan tetapi perubahan tersebut tidak merubah sasaran, indikator dan target kinerja, hanya anggarannya yang disesuaikan dengan DPPA yang bertambah sebesar Rp.38.877.557.279,- atau sebesar 27,62 % yang berasal dari SILPA audited tahun 2022 dan peningkatan rencana pendapatan.

C. RENCANA ANGGARAN

1. Target Belanja

Adanya perubahan struktur belanja yang berlaku mulai tahun 2021 dimana pada 2020 struktur belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, kemudian pada tahun 2021 berubah menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer sehingga mempengaruhi perubahan pelaksanaan perencanaan anggaran di semua daerah. Pada anggaran perubahan 2023 RSUD Kota Yogyakarta menganggarkan belanja operasi yang

nilainya sebesar Rp.134.207.914.509,- atau sekitar 74,72% dan belanja modal yang nilainya sebesar Rp.45.406.156.000,- atau sekitar 25,28% dari total anggaran Rp.179.614.070.509,-. Berdasarkan Rencana bisnis anggaran yang telah disusun maka diuraikan dalam target belanja sesuai dengan program kegiatan, baik secara fisik maupun keuangan. Rincian target fisik dan keuangan pada anggaran perubahan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.
Target Fisik dan Keuangan Perubahan Tahun 2023

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Perubahan 2023		Target Akhir Renja 2023	
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			179.614.070.509		179.614.070.509
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			143.321.904.909	100%	143.321.904.909
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.890.000	100%	5.890.000
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2023, dan Renstra	5 dokumen	5.890.000	100%	5.890.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.736.000	100%	6.000.000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan bulanan/ Semesteran	12 laporan	5.736.000	100%	1.200.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.000.000	100%	3.000.000
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	3 dokumen	3.000.000	100%	3.000.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			423.455.610	100%	423.455.610
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	199.810.000	100%	199.810.000
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	2 Paket	223.645.610	100%	223.645.610
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.737.860.000	100%	7.737.860.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan	12 bulan	84.000.000	100%	84.000.000
	Pembayaran Rekening Air	12 bulan	7.200.000	100%	7.200.000
	Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan	1.860.000.000	100%	1.860.000.000
	Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan	450.000.000	100%	450.000.000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Perubahan 2023		Target Akhir Renja 2023	
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	12 bulan	492.072.000	100%	492.072.000
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	12 bulan	79.248.000	100%	79.248.000
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12 bulan	753.824.000	100%	753.824.000
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	12 bulan	356.616.000	100%	356.616.000
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1 Tahun	3.360.000.000	100%	3.360.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	12 bulan	198.120.000	100%	198.120.000
	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	12 bulan	57.156.000	100%	57.156.000
	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	12 bulan	39.624.000	100%	39.624.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.896.330.000	100%	1.896.330.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	33.360.000	100%	33.360.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	62.970.000	100%	62.970.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	120.000.000	100%	120.000.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 paket	1.680.000.000	100%	1.680.000.000
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD			133.249.633.299	100%	133.249.633.299
Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Operasional BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	133.249.633.299	100%	133.249.633.299
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			36.292.165.600	100%	36.292.165.600
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			35.641.165.600	100%	35.641.165.600
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	200.000.000	100%	200.000.000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Perubahan 2023		Target Akhir Renja 2023	
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 paket	4.772.000.000	100%	4.772.000.000
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	103 Unit	13.553.156.000	100%	13.553.156.000
Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	Obat-obatan Pasien	2 Paket	7.087.009.600	100%	7.087.009.600
Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	2 paket	7.500.000.000	100%	7.500.000.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	15 paket	2.529.000.000	100%	2.529.000.000
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000	100%	50.000.000
Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2 dokumen	50.000.000	100%	50.000.000
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			601.000.000	100%	601.000.000
Sub Kegiatan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan jaringan Internet	Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang disediakan	29 unit	601.000.000	100%	601.000.000

2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Alokasi perubahan anggaran sesuai sasaran strategis RSUD Kota Yogyakarta dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 7.
Alokasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kinerja	Anggaran	Persentase
Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp.143.321.904.909,-	79,79%
Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Hasil Akreditasi Paripurna	LULUS Akreditasi Paripurna	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp.36.292.165.600,-	20,21%
Total Anggaran				Rp.179.614.070.509,-	100%

Berdasar tabel diatas, RSUD Kota Yogyakarta mengampu 2 program dengan alokasi anggaran sebesar 79,79% untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 20,21% untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran capaian kinerja RSUD Kota Yogyakarta didasarkan pada Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh Direktur sebagai penerima mandat dan Walikota Yogyakarta sebagai pemberi mandat berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja RSUD Kota Yogyakarta pada tahun 2023 mempunyai 2 (dua) sasaran strategis yaitu “Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat serta Meningkatkan Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta” dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa “Hasil Akreditasi Paripurna dengan target Lulus Akreditasi Paripurna dan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dengan target nilai A (>80-90)” yang kemudian dijabarkan dalam 2 program berdasarkan penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

1. Capaian Sasaran Strategis

Capaian sasaran strategis perangkat daerah berdasarkan target 5 tahunan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, kemudian untuk Indikator Kinerja Utama RSUD Kota Yogyakarta yang tercantum dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 adalah “Hasil Akreditasi Paripurna dengan target Lulus Akreditasi Paripurna dan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dengan target nilai A (>80-90)”. Pencapaian target RSUD Kota Yogyakarta dari Indikator Kinerja Utama per tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 8.
Pencapaian Kinerja Tahunan RSUD Kota Yogyakarta

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian				
			2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Target	LULUS PARIPURNA	LULUS PARIPURNA	LULUS PARIPURNA	LULUS PARIPURNA	LULUS PARIPURNA	
	Hasil Akreditasi Paripurna	Realisasi	LULUS PARIPURNA	LULUS PARIPURNA	-	-	-	
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta	Target	74,44 poin	A	A	A	A	
	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Realisasi	A (88,31)	A (81)	-	-	-	

a. IKU I Standar Pelayanan RS Berbasis Mutu Dan Keselamatan Pasien Meningkat

Target IKU (Indikator Kinerja Utama) tahun 2023 yang pertama yaitu Lulus Akreditasi Paripurna telah tercapai, dimana pada tahun 2022 tepatnya tanggal 4-6 Oktober 2022 telah dilakukan penilaian akreditasi RS oleh KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) dengan hasil Lulus Paripurna serta beberapa saran perbaikan yang harus segera ditindaklanjuti oleh RS. Status akreditasi paripurna ini berlaku selama 4 (empat) tahun dengan tetap dilakukan survei evaluasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi DIY setiap tahunnya. Masa berlaku status akreditasi paripurna RSUD Kota Yogyakarta tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2026. Pada bulan Oktober 2023 telah dilakukan survei evaluasi penilaian akreditasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Yogyakarta guna melakukan penilaian atas tindaklanjut saran perbaikan yang telah dilakukan oleh RSUD Kota Yogyakarta pada saat penilaian KARS pada bulan Oktober tahun 2022 serta memberikan saran perbaikan mengenai kondisi saat ini apabila terdapat perubahan kebijakan sehingga mempengaruhi

standarisasi dalam penilaian KARS pada periode berikutnya yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara hasil Evaluasi.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit disebutkan bahwa Akreditasi RS adalah sebuah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit setelah dilakukan penilaian oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yaitu Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Status akreditasi ditetapkan setelah dinilai bahwa Rumah Sakit telah memenuhi standar pelayanan yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara berkesinambungan.

Dalam melakukan penilaian akreditasi, KARS berpedoman pada standar akreditasi Rumah Sakit yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2023 tanggal 13 April 2023 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. Berdasar pada Kepmenkes tersebut kemudian KARS menetapkan instrumen survei akreditasi yang disebut sebagai STARKES (Standar Akreditasi Rumah Sakit Kemenkes RI). STARKES memuat instrumen, daftar tilik, dan alat bantu survei dalam melakukan penilaian agar hasil yang diperoleh bersifat obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menerapkan prinsip keadilan, profesionalisme, dan menghindari terjadinya konflik kepentingan. STARKES juga berlaku sebagai pedoman bagi Rumah Sakit dalam mempersiapkan diri menghadapi survei dan juga dipergunakan oleh surveyor internal dalam mempersiapkan akreditasi RS.

Instrumen survei akreditasi KARS merupakan instrumen yang dipergunakan KARS untuk menilai kepatuhan RS terhadap STARKES yaitu standar pelayanan berfokus pada pasien untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien dengan pendekatan manajemen risiko di Rumah Sakit yang terdiri dari 4 kelompok sebagai berikut:

1. Kelompok Manajemen Rumah Sakit terdiri atas:
 - a. Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)
 - b. Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS)
 - c. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
 - d. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
 - e. Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (MRMIK)
 - f. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
 - g. Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan (PPK)
2. Kelompok Pelayanan Berfokus pada Pasien terdiri atas:
 - a. Akses dan Kontinuitas Pelayanan (AKP)

- b. Hak pasien dan Keluarga (HPK)
 - c. Pengkajian Pasien (PP)
 - d. Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP)
 - e. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)
 - f. Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO)
 - g. Komunikasi dan Edukasi (KE)
3. Kelompok Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)
 4. Kelompok Program Nasional (PROGNAS)

Setelah dilakukan penilaian, hasil akreditasi berdasarkan pemenuhan standar akreditasi mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Paripurna, Seluruh bab mendapat nilai minimal 80%
2. Utama, 12 – 15 bab mendapatkan nilai 80% dan bab SKP mendapat nilai minimal 80%.
3. Madya, 8 sampai 11 bab mendapat nilai minimal 80% dan bab SKP mendapat nilai minimal 70%
4. Tidak terakreditasi,
 - a. Kurang dari 8 Bab yang mendapat nilai minimal 80%; dan/atau
 - b. Bab SKP mendapat nilai kurang dari 70%

Merupakan tantangan dan perlu upaya maksimal bagi seluruh civitas Rumah Sakit untuk memenuhi standar penilaian akreditasi dan melakukan perbaikan, sehingga diharapkan kelulusan tingkat Paripurna tidak hanya sekedar mendapatkan sertifikat saja tetapi diharapkan juga optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat.

b. IKU II Meningkatkan Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta

Kemudian untuk Target IKU (Indikator Kinerja Utama) tahun 2023 yang kedua yaitu Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai tuntutan masyarakat dan dinamika kompleksitas global. Dalam rangka melakukan percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional melalui RB, maka perlu dilakukan penajaman terhadap Road Map RB. Berdasarkan Road Map RB yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020– 2024, tujuan RB setelah dilakukan penajaman adalah birokrasi

yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.

Secara umum, capaian Indeks RB Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2022 adalah 76,22 dari target 72 berdasarkan Road Map RB 2017–2022. Artinya, capaian Indeks RB di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah melebihi target. Namun, pelaksanaan RB di Pemerintah Kota Yogyakarta masih perlu upaya optimalisasi dan penyesuaian terhadap arah kebijakan nasional.

Guna menunjang capaian Indeks RB Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2022 telah dilakukan evaluasi penilaian PMPRB oleh Inpektorat di RSUD Kota Yogyakarta dengan hasil 88,31 yang kemudian dirinci sebagai berikut:

Tabel 9.
Hasil Penilaian PMPRB Tahun 2022

URAIAN		BOBOT	NILAI
Pengungkit		36.30	32.06
I	Pemenuhan	14.60	12.14
	1. Manajemen Perubahan	2.00	1.70
	2. Deregulasi Perubahan	1.00	0.50
	3. Penataan dan Penguatan Organisasi	2.00	2.00
	4. Penataan Tatalaksana	1.00	0.76
	5. Penataan Sistem Manajemen SDM	1.40	1.24
	6. Penguatan Akuntabilitas	2.50	2.39
	7. Penguatan Pengawasan	2.20	1.63
	8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2.50	1.93
II	Reform	21.70	19.91
	1. Manajemen Perubahan	3.00	3.00
	2. Deregulasi Perubahan	2.00	2.00
	3. Penataan dan Penguatan Organisasi	1.50	1.50
	4. Penataan Tatalaksana	3.75	3.58
	5. Penataan Sistem Manajemen SDM	2.00	1.42
	6. Penguatan Akuntabilitas	3.75	3.25
	7. Penguatan Pengawasan	1.95	1.95
	8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3.75	3.21

Pada tahun 2023 terdapat perubahan arah kebijakan RB Pemerintah kota Yogyakarta, dimana pelaksanaan RB dituntut untuk dapat berkontribusi dalam

penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi pada masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan pelaksanaan RB yang berkualitas pada akhirnya harus berkontribusi terhadap percepatan pembangunan daerah, maka dengan berakhirnya Road Map RB Pemerintah Kota Yogyakarta 2017–2022 dan amanat penyesuaian Road Map RB 2020–2024 berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyusun Road Map RB Pemerintah Kota Yogyakarta 2023–2026 yang periodenya diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2023–2026. Sesuai dengan fokus double track pelaksanaan RB Nasional, pembangunan RB di Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri atas:

- a. RB Tematik bertujuan untuk menjawab problem hilir yang berfokus mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional, meliputi tema:
 1. kemiskinan;
 2. investasi;
 3. digitalisasi pemerintahan;
 4. penggunaan produk dalam negeri; dan
 5. inflasi.
- b. RB General bertujuan untuk menjawab problem hulu yang berfokus memperbaiki manajemen internal Pemerintah Kota Yogyakarta, meliputi sasaran strategis:
 1. tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif; dan
 2. budaya birokrasi BerAKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional.

Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah Keputusan Walikota Nomor 291 tahun 2023 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tahun 2023 yang mengatur mengenai Rencana Aksi RB General dan Tematik Pemerintah Kota Yogyakarta yang kemudian menjadi dasar bagi seluruh OPD Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyusun Rencana Aksi RB baik RB General maupun Tematik.

RSUD Kota Yogyakarta dalam mendukung Pelaksanaan RB General Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyusun Rencana Aksi RB General melalui Keputusan Direktur RSUD Kota Yogyakarta Nomor 445/469/KPTS/IX/2023 tentang Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023.

Kemudian sebagai tindaklanjut Pelaksanaan RB General yang mendukung Pemerintah Kota Yogyakarta, pada periode Triwulan III tahun 2023 telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat dengan hasil evaluasi pelaksanaan rencana aksi RB

General RSUD Kota Yogyakarta tahun 2023 adalah sebesar 90% dari target yang ditetapkan sampai dengan Triwulan III. Sehingga apabila dilakukan konversi formula perhitungan dari target nilai A (>80-90) maka nilai capaian RB RSUD Kota Yogyakarta TW III tahun 2023 adalah 100% dengan realisasi nilai A (81).

2. Capaian Indikator Program

Capaian kinerja program tahun 2023 diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 10.
Capaian Kinerja Program Tahun 2023

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUN 2023	REALISASI	CAPAIAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80-90)	-	100%
		Prosentase pendapatan BLUD rumah sakit	100%	111,56%	111,56%
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasikan secara optimal	80,25 %	80,97%	100,9%
		Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	80%	88,89%	111,11%
		Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan	80%	93,41%	116,76%

Berdasarkan tabel diatas, semua indikator program telah tercapai dengan baik dan melebihi target yang ditetapkan. Hampir tidak ada hambatan dalam pencapaian target indikator program tersebut, sedangkan faktor pendorong tercapainya target bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat dengan target nilai A.

Pencapaian nilai A pada penilaian SAKIP diupayakan dengan terus memperbaiki perencanaan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas pelaksanaan kegiatan, menyempurnakan laporan kinerja, dan memaksimalkan pemanfaatan laporan kinerja sebagai feedback dalam memperbaiki perencanaan dan peningkatan kinerja.

2. Indikator Prosentase pendapatan BLUD rumah sakit.

Pada indikator ini targetnya adalah Terpenuhinya Prosentase pendapatan BLUD rumah sakit di RSUD Kota Yogyakarta. Capaian target pendapatan BLUD RSUD Kota Yogyakarta pada tahun 2023 ini sebanyak 111,56% dari target pendapatan

pada tahun 2023 sebesar Rp.86.015.384.520,- dengan realisasi pendapatan sampai dengan bulan desember tahun 2023 adalah Rp.95.957.791.033,-.

3. Indikator Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasikan secara optimal.

Rumah Sakit selalu berupaya memenuhi ketersediaan Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis sesuai standar yang ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, Dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit. Target nilai tahun 2023 pada indikator ini adalah sebesar 80.25% dan terealisasi sebesar 80,97% karena terdapat penambahan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang dimiliki RS terkait pemenuhan layanan prioritas KIA berupa Alat Kedokteran RS Mampu PONEK dan beberapa Alat Kedokteran lainnya yang dipenuhi melalui berbagai sumber dana baik DAK, APBD maupun BLUD.

4. Indikator Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS.

Target pada indikator ini adalah sebesar 80%, pada tahun 2023 realisasi pencapaian Indikator Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS sebanyak 88,89% hal tersebut didorong oleh adanya perbaikan pelayanan melalui kegiatan renovasi ruang tunggu pelayanan dan ruang rawat inap sesuai dengan standar KRIS serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit.

5. Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan.

Target pada indikator ini adalah sebesar 80%, realisasi pada triwulan IV mengalami kenaikan sebesar 93,41%, apabila dibandingkan target dengan realisasi maka capaian indikator persentase instrumen mutu asuhan keperawatan adalah sebesar 116,76% dihitung dari target yang telah ditetapkan sebesar 80%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dan 2023

Sasaran strategis RSUD Kota Yogyakarta tahun 2023 adalah “Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat” dengan indikator “Hasil Akreditasi Paripurna”, target “Lulus Akreditasi Paripurna” dan “Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta” dengan indikator “Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat” dan target “nilai A (>80-90)”. Capaian tahun 2022 dan 2023 pada indikator “Hasil Akreditasi Paripurna” telah terealisasi dengan predikat Lulus Akreditasi Paripurna. Pada tahun 2022 masih berlaku status akreditasi paripurna atas survei yang dilakukan pada bulan Mei 2019 dengan masa berlaku 3 tahun mulai tanggal 8 Mei 2019 sampai tanggal 7 Mei 2022. Sedangkan pada tahun 2023 mengacu pada hasil penilaian Akreditasi “Lulus Paripurna” yang dilakukan bulan Oktober 2022 dengan masa berlaku 4 tahun mulai tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2026.

Selanjutnya capaian tahun 2022 untuk indikator sasaran “Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat” mendapatkan nilai sebesar “88,31” sedangkan pada periode tahun 2023 terdapat perbedaan formulasi penilaian dimana penilaian RB pada OPD saat ini dinilai dengan pencapaian target rencana aksi RB Tematik maupun General, hal tersebut mengacu pada Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 239 Tahun 2023 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023–2026 dan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 291 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Pelaksanaan Road Map RB tahun 2023-2026 menjadi media untuk menyamakan persepsi dan langkah bersama dari setiap komponen di Pemerintah Kota Yogyakarta guna tercapainya sasaran dan target reformasi birokrasi RB yang dilakukan. Pembangunan RB yang dilakukan oleh setiap komponen OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri atas RB Tematik dan RB General. RSUD Kota Yogyakarta sebagai salah satu komponen Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2023 telah melaksanakan Rencana Aksi RB General dan telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat dengan hasil nilai A (81) berdasarkan penilaian yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan III.

Capaian indikator program tahun 2022 dan 2023 apabila disandingkan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 11.
Capaian Realisasi Program Tahun 2022 dan 2023

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80-90)	A (Nilai 84,13)	100%	A (Nilai >80-90)	A (Nilai 84,13)	100%
		Prosentase pendapatan BLUD rumah sakit	-	-	-	100%	111,56%	111,56%
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasikan secara optimal	80%	83,03%	103,8%	80,25 %	86.43%	108%
		Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	-	-	-	80%	88,89%	111,11%
		Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan	-	-	-	80%	93,41%	116,76%

Berdasar pada tabel diatas, tahun 2022 dan 2023 terdapat beberapa indikator program yang tidak dilaksanakan pada tahun 2022, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan target indikator yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2018 sd 2022 dengan indikator tahun 2023 sd 2026. Target Indikator pada tahun 2023 mengacu pada Peraturan walikota Yogyakarta Nomor 22 tahun 2022 Tentang Rencana pembangunan daerah kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Pada Peraturan walikota Yogyakarta Nomor 22 tahun 2022 terdapat 2 indikator yang juga dilaksanakan pada periode tahun 2022 yaitu

1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat
2. Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasikan secara optimal

Dari kedua indikator tersebut, terdapat peningkatan capaian pada indikator Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasikan secara optimal dimana pada tahun 2022 mencapai 103,8% dari realisasi 83,03% dan target 80% sedangkan tahun 2023 mencapai 108% dari realisasi 86.43% dan target 80,25%,

Selain terdapat perbedaan indikator program pada tahun 2022 dan 2023 juga terdapat perbedaan perhitungan formula indikator pada indikator program Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non

medis yang terpelihara dan dapat dioperasikan secara optimal, pada tahun 2022 dihitung berdasarkan data yang terdapat pada aplikasi ASPAC kementerian kesehatan RI sedangkan pada tahun 2023 formula perhitungannya adalah (Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang terpelihara dan dapat dioperasikan secara optimal : Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang dikelola) x 100%.

4. Capaian Kinerja Pelayanan

Pencapaian target sasaran strategis dan target program yang telah diuraikan diatas, tidak terlepas dari upaya yang dilakukan RSUD Kota Yogyakarta dalam memaksimalkan kinerja yang optimal dan efektif baik dalam kinerja organisasi maupun kinerja pelayanan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pengukuran tingkat capaian kinerja pelayanan RSUD Kota Yogyakarta dilakukan dengan mengadakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap semester pada tahun berjalan. Perbandingan hasil survey IKM pada 2 semester terakhir yaitu semester 1 dan semester 2 tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12.
Hasil Survei IKM Tahun 2023

No.	Unsur Pelayanan	Nilai IKM		Keterangan
		Semester I Tahun 2023	Semester II Tahun 2023	
1	Persyaratan Pelayanan	84,36	88,67	Meningkat
2	Prosedur Pelayanan	84,04	87,88	Meningkat
3	Waktu Pelayanan	83,50	87,56	Meningkat
4	Biaya / Tarif	82,33	86,55	Meningkat
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	82,25	86,77	Meningkat
6	Kompetensi Pelaksana	83,97	87,86	Meningkat
7	Perilaku Pelaksana	85,49	89,02	Meningkat
8	Maklumat Pelayanan	82,27	86,79	Meningkat
9	Mekanisme dan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	82,97	86,94	Meningkat
10	Keadilan Pelayanan	82,57	87,29	Meningkat
11	Kenyamanan Lingkungan	82,48	86,35	Meningkat
	IKM Unit Pelayanan	83,29	87,43	Meningkat
	Mutu Pelayanan	B	B	
	Kinerja Unit Pelayanan	Baik	Baik	

Secara umum nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) total semua unsur pelayanan di RSUD Kota Yogyakarta pada semester II Tahun 2023 adalah 87,43

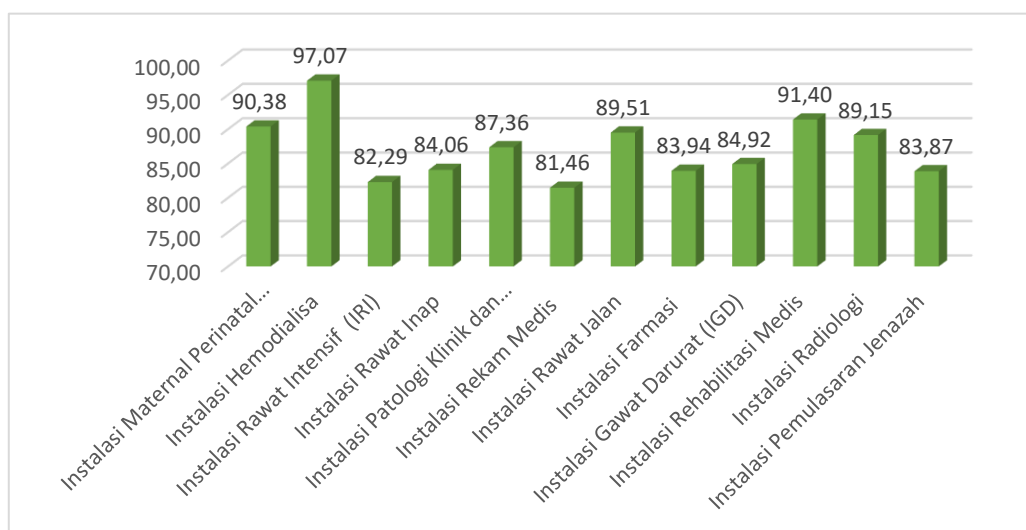
masuk dalam kategori interval IKM antara 76,61 – 88,30 dengan simpulan mutu pelayanan B, dan kinerja unit pelayanan kategori Baik. Berdasarkan tabel diatas, nilai rata-rata IKM semester II pada semua unsur pelayanan mengalami kenaikan dibandingkan dengan nilai IKM semester I dengan kriteria kinerja unit pelayanan yang sama yaitu Baik. Nilai indeks tertinggi diperoleh oleh kriteria Perilaku Pelaksana sebesar 89,02 sedangkan nilai terendah adalah Kenyamanan Lingkungan dengan nilai sebesar 86,35.

Untuk meningkatkan nilai unsur pelayanan pada survei IKM selanjutnya, RSUD Kota Yogyakarta akan melakukan beberapa upaya guna meningkatkan kualitas nilai pelayanan yang telah ada. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan unsur “Kenyamanan Lingkungan” antara lain dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan melalui kegiatan renovasi dan rehabilitasi beberapa ruang/Gedung yang digunakan untuk pelayanan medis dan non medis serta pelayanan penunjang yang menggunakan berbagai macam sumber anggaran baik APBD, dan BLUD.
- b. Melakukan standarisasi Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, Dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit

Capaian nilai IKM per Instalasi pada semester 2 tahun 2023 digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 1.
Capaian Nilai IKM Per Instalasi Semester 2 Tahun 2023



Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa nilai IKM tertinggi Semester II Tahun 2023 dicapai oleh Instalasi Hemodialisa dengan nilai 97,07 dan masuk dalam kriteria sangat baik (A), sedangkan nilai paling rendah oleh Instalasi Rekam Medis dengan nilai 81,41 dan masuk kriteria baik (B).

5. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional Atau Yang Sejenis

Capaian kinerja RSUD Kota Yogyakarta apabila dibandingkan dengan standar nasional/RPJMN tidak dapat diperbandingkan karena tidak ada standar nasional untuk pelayanan Rumah Sakit yang berbasis mutu dan keselamatan pasien. Sedangkan apabila dibandingkan dengan instansi sejenis yang setara/sekelas juga tidak bisa karena setiap Rumah Sakit mempunyai indikator yang berbeda dalam mengukur capaian program masing-masing.

Berkaitan dengan status RSUD saat ini sebagai OBK (Organisasi Bersifat Khusus) yang berada di bawah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sehingga sasaran dan program diformulasikan untuk mendukung Dinas Kesehatan dalam mencapai sasaran 8 RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 yaitu Harapan Hidup Masyarakat Meningkat.

Sebagai alternatif dapat disajikan perbandingan capaian status akreditasi yang dicapai oleh RSUD Kota Yogyakarta dengan Rumah Sakit di Kota Yogyakarta dan DIY. Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, pada pasal 40 bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali yang dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah membentuk KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit), sehingga capaian status akreditasi disajikan berdasarkan data akreditasi RS kelas B yang dilakukan oleh KARS sebagai berikut:

Tabel 13.

Data Akreditasi Rumah Sakit Kelas B Kota Yogyakarta

NO	NAMA RUMAH SAKIT	STATUS AKREDITASI	KELAS RUMAH SAKIT	STANDAR AKREDITASI
1.	RS Umum Daerah Kota Yogyakarta	Tingkat Paripurna	Kelas B	STARKES
2.	RS Mata Dr. Yap	Tingkat Paripurna	Kelas B	STARKES
3.	RS Umum Panti Rapih	Tingkat Paripurna	Kelas B	STARKES
4.	RS Bethesda Yogyakarta	Tingkat Paripurna	Kelas B	STARKES

Sumber: https://kars.or.id/ws/view_hasil_akreditasi.php

Sebagai perbandingan jumlah RS kelas B di Kota Yogyakarta ada 6 RS yang terdiri dari Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. Berdasar tabel diatas, jumlah RS kelas B yang terakreditasi KARS ada 4 RS termasuk RSUD Kota Yogyakarta. Sedangkan RS Kelas B yang terakreditasi KARS di DIY sebagai berikut:

Tabel 14.

Data Akreditasi Rumah Sakit Kelas B Provinsi DIY

NO	NAMA RUMAH SAKIT	STATUS AKREDITASI	KELAS RUMAH SAKIT	STANDAR AKREDITASI
1.	RS Umum Daerah Kota Yogyakarta	Tingkat Paripurna	Kelas B	STARKES
2.	RS Mata Dr. Yap	Tingkat Paripurna	Kelas B	STARKES
3.	RS Umum Panti Rapih	Tingkat Paripurna	Kelas B	STARKES
4.	RS Bethesda Yogyakarta	Tingkat Paripurna	Kelas B	STARKES
5.	RS Jih	Tingkat Paripurna	Kelas B	STARKES
6.	RSPAU Dr. Suhardi Harjolukito	Tingkat Paripurna	Kelas B	STARKES
7.	RSUD Panembahan Senopati	Tingkat Paripurna	Kelas B	STARKES
8.	RSUD Wates	Tingkat Paripurna	Kelas B	STARKES
9.	RSUD Sleman	Tingkat Paripurna	Kelas B	STARKES
10.	RS PKU Muhammadiyah Gamping	Tingkat Paripurna	Kelas B	STARKES

Sumber: https://kars.or.id/ws/view_hasil_akreditasi.php

Berdasarkan tabel RS Kelas B diatas, terdapat 10 Rumah Sakit yang terakreditasi KARS di Provinsi DIY, sedangkan jumlah total Rumah Sakit Kelas B yang ada di Provinsi DIY berjumlah 14 RS.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Dalam pencapaian indikator sasaran strategis dan indikator program tidak terlepas dari faktor pendorong dan penghambat yang harus dihadapi, faktor pendorong keberhasilan pencapaian target RSUD Kota Yogyakarta diantaranya sebagai berikut:

- a. Adanya perbaikan terus menerus dari RSUD Kota Yogyakarta dalam meningkatkan pelayanan melalui berbagai kegiatan standarisasi ruangan maupun standarisasi pelayanan kesehatan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan di Kota Yogyakarta dan sekitarnya;
- b. Adanya dukungan anggaran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat (DAK Fisik Bidang Kesehatan) oleh Kementerian Kesehatan melalui program peningkatan 10 layanan prioritas berupa dukungan RS mampu (PONEK).

Kemudian untuk hambatan yang dihadapi berasal dari berbagai faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sistem pelayanan kesehatan berjenjang sesuai ketentuan pelaksanaan BPJS dapat membatasi cakupan pelayanan kesehatan (kasus lanjut) RSUD Kota Yogyakarta. Sebagai RS kelas B, pasien BPJS hanya dapat dilayani apabila ada rujukan dari fasilitas kesehatan di bawahnya walaupun secara akses lebih dekat. Penerapan system P-Care yang dilakukan BPJS Kesehatan semakin mempersempit akses pasien untuk berobat ke RSUD Kota Yogyakarta karena akan ditapis sesuai sistem dengan hanya dapat dilayani oleh RS dengan kelas dibawah RSUD Kota Yogyakarta. Dengan adanya permasalahan ini, RSUD Kota Yogyakarta perlu untuk mempertimbangkan pengembangan pelayanan dengan tidak hanya berorientasi pada pasien BPJS tetapi juga pada pelayanan non BPJS;
- b. Masih sangat minimnya ketersediaan barang khususnya jumlah alat kesehatan dengan TKDN sesuai dengan ketentuan P3DN, terutama untuk alat kesehatan yang berteknologi tinggi, sehingga harus melakukan import dan hal tersebut mempengaruhi capaian kinerja terutama kegiatan yang berhubungan dengan belanja alat-alat kedokteran. Maka guna mengatasi kendala tersebut perlunya dilakukan optimalisasi penggunaan produk TKDN bagi alat-alat kesehatan selama masih sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan user, sedangkan untuk penggunaan peralatan dengan teknologi tinggi yang hanya bisa dipenuhi melalui import, terlebih dahulu dilakukan analisa untuk pemilihan alat kesehatan luar negeri sesuai dengan kebutuhan user dan standar keselamatan pasien terkait life saving serta dibentuknya Tim HTA (Health Technic Assesment) terkait penilaian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan;
- c. Perubahan regulasi pada beberapa layanan jaminan asuransi baik asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan) maupun asuransi kecelakaan (BPJS Tenaga Kerja, Jasa Raharja) sehingga mempengaruhi perubahan ketentuan syarat kelengkapan dokumen pengajuan klaim yang menyebabkan klaim menjadi tertunda atau tertolak dalam proses verifikasi oleh BPJS Kesehatan maupun Asuransi lainnya. Sebagai tindaklanjut penanganan hal tersebut maka dibuatlah PPK (Panduan Praktek Klinis) sebagai acuan bagi case manager untuk mencegah terjadinya klaim BPJS yang tertunda/tertolak dan selalu dilakukan pembaruan data pada PPK sesuai dengan kategori kasus yang dihadapi pada tahun sebelumnya.

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis, program dan kegiatan RSUD Kota Yogyakarta sebagai berikut:

a. Keuangan

Perhitungan efisiensi keuangan tidak terlepas dari penerimaan pendapatan dan realisasi belanja. Sumber pendanaan operasional pelayanan Rumah Sakit tahun 2023 bersumber dari pendapatan BLUD dan APBD Pemerintah Kota Yogyakarta. Target pendapatan tahun 2023 adalah sebesar Rp.86.015.384.520,- dan terealisasi melebihi target yaitu nilainya sebesar Rp.95.957.791.033,- atau sekitar 111,56%. Sedangkan penyerapan anggaran tahun 2023 secara keseluruhan mencapai angka 84,68% dari target belanja 2023 atau sekitar Rp.152.117.999.089,- dari total anggaran perubahan 2023 sebesar Rp.179.644.070.509,-. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran belanja tahun 2023 senilai Rp.152.117.999.089,- dapat menghasilkan penerimaan pendapatan BLUD sebesar Rp.95.957.791.033,-. Dari total belanja tahun 2023 sebesar Rp.152.117.999.089,- terdapat beberapa belanja yang mengalami efisiensi dimana output dari target yang ditetapkan telah tercapai 100% dengan realisasi keuangan tidak mencapai 100%.

b. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan bulan Desember 2023 total pegawai yang dimiliki RSUD Kota Yogyakarta berjumlah 709 orang yang terdiri dari tenaga medis dan non medis baik yang berstatus PNS, CPNS, NABAN, BLUD, Mitra dan Tenaga Teknis. Perhitungan jumlah penerimaan pendapatan sebesar Rp.95.957.791.033,- dibandingkan jumlah pegawai sebesar 709 menghasilkan angka Rp.95.957.791.033,-. Sehingga bisa disimpulkan bahwa per 1 (satu) orang pegawai mampu menghasilkan pendapatan sebesar Rp.135.342.441,5,- per tahun.

c. Aset Sarana Prasarana

Jumlah total keseluruhan aset RSUD Kota Yogyakarta yang terdiri dari aset tetap dan aset lainnya berdasarkan laporan pencatatan aset sampai dengan bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp.311.535.816.876,-, jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan pendapatan yang sebesar Rp.95.957.791.033,- maka menghasilkan angka sebesar 30,80%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa total aset guna memenuhi standarisasi pelayanan telah berperan dalam pencapaian pendapatan sebesar 30,80%.

8. Analisis Program/Kegiatan terkait dengan Pengarus Utamaan Gender

RSUD Kota Yogyakarta sebagai salah satu pelaksana pelayanan kesehatan pemerintah dibawah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan program dan kegiatannya telah mendukung pencapaian strategi pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pemerintah Kota Yogyakarta yang menysasar 5 (lima) kelompok rentan (fakir miskin, disabilitas, anak, perempuan dan/atau lansia) melalui berbagai upaya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kelompok Sasaran	Upaya/Kegiatan
1	Fakir Miskin	Pemberian layanan kesehatan masyarakat bagi kategori masyarakat kurang mampu peserta program Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos) dan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Dimana selama kurun waktu tahun 2023 RSUD Kota Yogyakarta telah menangani pasien sebanyak: 1. Jamkesda 109 Pasien; 2. Jamkesos 1424 Pasien.
2	Disabilitas	Pemberian fasilitas layanan penunjang berupa: 1. Toilet khusus disabilitas 2. Layanan kursi roda yang disediakan dibagian depan pelayanan bagi pasien penyandang disabilitas maupun lansia.
3	Anak	1. Pemenuhan layanan kesehatan RS Mampu Ponek (Pelayanan PICU dan NICU) 2. Layanan Kesehatan Poli Anak 3. Fasilitas ruang bermain anak
4	Perempuan	1. Pemenuhan layanan kesehatan RS Mampu Ponek (Pelayanan Persalinan, Bangsal Khusus Bersalin) 2. Fasilitas Ruang Menyusui 3. Fasilitas Toilet yang dipisahkan antara Toilet untuk Laki-laki dan Perempuan
5	Lansia	Pemberian fasilitas layanan penunjang berupa: 1. Toilet khusus disabilitas dan lansia 2. Layanan kursi roda yang disediakan dibagian depan pelayanan bagi pasien penyandang disabilitas maupun lansia 3. Layanan Kesehatan Poli Geriatri

9. Inovasi Tahun 2023

Inovasi dilakukan untuk memberikan dukungan terhadap capaian kinerja organisasi, inovasi tahun 2023 sebagai berikut:

1. OTEWE MASJO

OTWE MASJO (Obat Teko Dewe Rumah Sakit Jogja) adalah salah satu inovasi layanan pengantaran obat yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan pelayanan (antrian) pada Intalasi Farmasi di RSUD Kota Yogyakarta yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara RSUD Kota Yogyakarta dengan

pihak Swasta. Layanan ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh pasien RSUD Kota Yogyakarta yang berdomisili di seluruh DIY.

10. Penghargaan Yang Diraih

Pencapaian kinerja tahun 2023 telah menghasilkan beberapa penghargaan, penghargaan yang diraih RSUD Kota Yogyakarta selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pemenang Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas dan RS di DIY Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Prov DIY untuk Adriyanto Rochmad Basuki, S.Far., Apt., M.Farm dan Dafik Ya`Lu Ulinnuha, S.Kep., Ns.;
- b. Juara 1 Umum Gerak Jalan POR KORPRI Kota Yogyakarta tahun 2023;
- c. Juara 2 National Dialysis Education Competition ;
- d. Prestasi Nominasi Terbaik Pelaporan Indikator Mutu RS Kelas B Tahun 2023 di DIY;
- e. Penghargaan E Poster Award Korean Society Of Heart Failure (KSHF and CTC Asia 2023 Korsel untuk dr. Tyas Pramitasari dan dr. Sabila Fatimah;
- f. Juara Pertama Lomba Senam Kreasi Hari Kesehatan Nasional ke 59 tingkat Unit Layanan Kesehatan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- g. Pemenang lomba karaoke kategori OPD Kota Yogyakarta;
- h. Pemenang Gender Champion 2023 Aprilya Dewi Kartika Sari, M.Psi.,Psikolog

11. Kolaborasi Lintas Sektor Yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Pencapaian Kinerja tahun 2023 tidak terlepas dari peran serta seluruh civitas hospitalia dan stakeholders RSUD Kota Yogyakarta yang dengan upaya maksimal bekerjasama untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah tertuang dalam Renstra Tahun 2023-2026. Kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pencapaian kinerja dilakukan dengan mengedepankan prioritas pelayanan pada pasien dan masyarakat.

Struktur organisasi RSUD Kota Yogyakarta pada tahun 2023 ini terdapat perubahan pasca adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi pada Instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah. Sebelumnya struktur organisasi diatur oleh Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan kemudian diganti dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan dimana struktur organisasi pada RSUD Kota Yogyakarta yang semula terdiri dari 2 bagian dengan 5 sub bagian di bawah Wakil Direktur Umum dan Keuangan saat ini menjadi 2 sub bagian dengan kelompok jabatan fungsional dan unit kerja fungsional, kemudian 3 bidang di bawah Wakil Direktur Pelayanan yang semula memiliki 5 seksi, saat ini dihapuskan menjadi kelompok jabatan fungsional dan unit kerja fungsional. Masing-masing memiliki peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan sehingga merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan melengkapi.

Selain peran internal, pihak eksternal juga berperan penting dalam pencapaian kinerja RSUD. Pihak eksternal tersebut adalah pihak-pihak dari luar sebagai pemangku kepentingan (Stakeholders), antara lain:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta, yang berfungsi sebagai perumus kebijakan, perencanaan, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
2. Kementerian Kesehatan RI sebagai salah satu penunjang dalam pemenuhan program kegiatan melalui penyaluran dana transfer pusat baik berupa Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), maupun berupa bantuan dari Pemerintah Pusat (Banper) atau Hibah.
3. Lembaga Pendidikan, RSUD sebagai Rumah Sakit Pendidikan berperan sebagai wahana pendidikan dan pelatihan.
4. Pasien dan Komunitas, sebagai penerima layanan medis rawat inap dan rawat jalan bagi pasien maupun layanan konsultasi kesehatan bagi komunitas pasien
5. Korporat sebagai pemasok kebutuhan operasional Rumah Sakit.

B. REALISASI ANGGARAN

Target dan realisasi pendapatan dan belanja per sub kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta tahun 2023 apabila dirinci secara lengkap maka dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 15.
Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2023

URAIAN/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERUBAHAN ANGGARAN 2023	REALISASI S.D DESEMBER 2023		% THD ANGGARAN
		Fisik	Keuangan	
Pendapatan	Rp 86.015.384.520	100%	Rp 95.957.791.033,00	111,56%
Jasa Layanan	Rp 85.215.000.000	100%	Rp 94.809.892.493,00	111,26%
Hibah	Rp 0		Rp 0	0,00%
Hasil Kerja Sama	Rp 173.984.520	100%	Rp 219.128.837,00	125,95%
Pendapatan BLUD yang sah	Rp 626.400.000	100%	Rp 928.769.703,00	148,27%

URAIAN/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERUBAHAN ANGGARAN 2023	REALISASI S.D DESEMBER 2023		% THD ANGGARAN
		Fisik	Keuangan	
Belanja	Rp 179.614.070.509	100%	Rp. 152.117.999.089	84,68%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 143.351.904.909	100%	Rp 117.550.107.490	82%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 5.890.000	100%	Rp 5.832.500	99,02%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 5.890.000	100%	Rp 5.832.500	99,02%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.736.000	100%	Rp 5.732.100,00	99,93%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 5.736.000	100%	Rp 5.732.100,00	99,93%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 3.000.000	100%	Rp 3.000.000	100%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 3.000.000	100%	Rp 3.000.000	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 453.455.610	100%	Rp 368.365.500	81,24%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 199.810.000	100%	Rp 169.835.000	85%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 223.645.610	100%	Rp 198.530.500	88,77%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 7.737.860.000	100%	Rp 7.547.227.237	97,54%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Rp 2.401.200.000	100%	Rp 2.275.967.237	94,78%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Rp 5.336.660.000	100%	Rp 5.271.260.000	98,77%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.896.330.000		Rp 1.868.373.104	98,53%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 33.360.000	100%	Rp 33.328.900	99,91%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 62.970.000	100%	Rp 38.564.204	61,24%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 120.000.000	100%	Rp 118.160.000	98,47%
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 1.680.000.000	100%	Rp 1.678.320.000	99,90%
Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp 133.249.633.299	100%	Rp 107.751.577.049	80,86%
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp 133.249.633.299	100%	Rp 107.751.577.049	80,86%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 36.292.165.600	100%	Rp 7.063.045.654	95,25%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 35.641.165.600	100%	Rp 33.984.646.099	95,35%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rp 200.000.000	100%	Rp 199.650.150	99,83%
Pengadaan Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 4.772.000.000	100%	Rp 4.218.060.000	88,39%
Pengadaan Alat Kesehatan/Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 13.553.156.000	100%	Rp 12.781.784.735	94,31%
Pengadaan Obat, Vaksin	Rp 7.087.009.600	100%	Rp 7.450.365.179	99,66%
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Rp 7.500.000.000	100%	Rp 7.450.365.179	99,34%
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 2,298,000,000	100%	Rp 2,091,891,359.00	91,03%
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	100%	Rp 49.965.500	99,93%
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp 50.000.000	100%	Rp 49.965.500	99,93%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Rp 601.000.000	100%	Rp 533.280.000	88,73%
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Rp 601.000.000	100%	Rp 533.280.000	88,73%

Sumber: Laporan Fungsional dan SIM Pelaporan sd. bulan Desember 2023

Berdasarkan tabel diatas, kedua program yang diampu memiliki realisasi anggaran yang baik meskipun anggaran tidak terserap 100%, akan tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan output tercapai. Selain itu juga telah dilakukan efisiensi pada beberapa kegiatan yang seluruh outputnya dapat tercapai dan terlaksana dengan baik sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran program telah mencukupi.

Pada program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota terealisasi sebesar 84,68%, realisasi keuangan ini relatif rendah karena adanya efisiensi dan tidak tercapainya target keuangan antara lain:

1. Adanya efisiensi pada belanja Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta belanja Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar 18,76%;
2. Belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi anggaran hanya sebesar 61,24% sesuai dengan kebutuhan penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Ambulans. Realisasi penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Ambulans ini cukup rendah hal tersebut dikarenakan berkurangnya permintaan penggunaan mobil ambulans oleh masyarakat akibat banyaknya pilihan ambulans yang disediakan secara gratis baik oleh pemerintah kota yogyakarta maupun organisasi-organisasi sosial masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta dan sekitarnya.

Kemudian pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar 95,25%, realisasi keuangan ini relatif baik meskipun terdapat beberapa capaian keuangan yang belum maksimal dan adanya efisiensi diantaranya sebagai berikut:

1. Pada sub kegiatan Pengadaan Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdapat belanja Belanja Modal Instalasi Lain yang terealisasi sebesar 89,01% karena tidak tercapainya kegiatan belanja Gas Medis Rumah Sakit (suction sentral rumah sakit).
2. Adanya efisiensi pada beberapa sub kegiatan diantaranya sebagai berikut:
 - a) Sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Belanja Modal Alat Kedokteran Umum sebesar 8,79% dari realisasi sebesar 92,21%;

- b) Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran, Belanja Jasa Kalibrasi, Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar 10,17% dari realisasi sebesar 89,83%;
- c) Sub kegiatan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet untuk Belanja Modal Komputer Unit, Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar 11,27% dari realisasi sebesar 88,73%.

Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang terealisasi dengan baik yaitu sebesar 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 84,68% dan capaian penerimaan pendapatan sebesar 111,56% menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah terpenuhi dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini disusun untuk menyajikan capaian kinerja yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan sasaran strategis yang dijabarkan dalam program dan kegiatan pada tahun terakhir RPD Kota Yogyakarta dan Renstra 2023-2026. Hasil capaian indikator kinerja dan sasaran diharapkan berjalan semakin baik dan senantiasa dapat memenuhi target serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan berbagai hambatan dan tantangan yang akan selalu ada. Sasaran strategis dan target indikator program RSUD Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2023 dapat tercapai dengan baik, yang kemudian dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis pada RSUD Kota Yogyakarta tahun 2023 terdapat 2 (dua) Sasaran Perangkat Daerah yaitu :
 - a. “Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat dengan indikator kinerja utama “Hasil Akreditasi Paripurna” tercapai dengan adanya sertifikat hasil penilaian akreditasi dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) yang berlaku tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2026;
 - b. “Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta” mendapatkan nilai sebesar nilai A (>80-90). Pada formula indikator sasaran ini terdapat perbedaan metodologi dimana penilaian RB pada OPD saat ini dinilai dengan prosentase pencapaian target rencana aksi RB, hal tersebut mengacu pada Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 239 Tahun 2023 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023–2026 dan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 291 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023.
2. Sasaran program sesuai Renstra tahun 2023-2026 mempunyai 5 indikator, dimana kesemuanya tercapai dan terealisasi melebihi target yang ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut atas ketercapaian target diatas, RSUD Kota Yogyakarta akan melakukan upaya-upaya perbaikan antara lain:

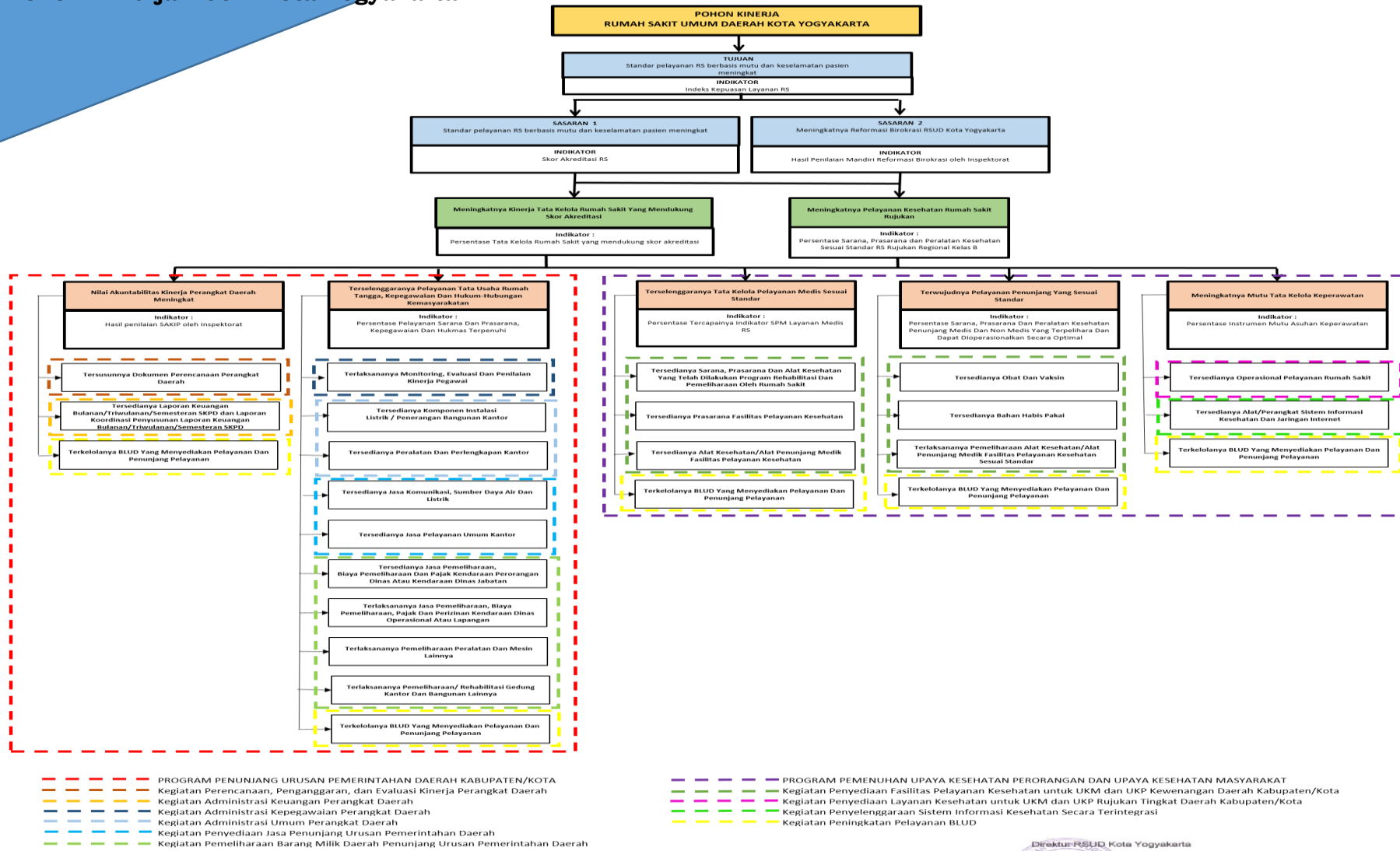
1. Berusaha meningkatkan kinerja dengan memaksimalkan koordinasi antar bidang/bagian dan stakeholders secara komprehensif;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala;

3. Memaksimalkan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan;
4. Serta melakukan optimalisasi penggunaan anggaran.

Keberhasilan pencapaian kinerja yang diraih oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta selama tahun 2023 yang didapat tidak lepas dari hambatan maupun permasalahan yang dihadapi sehingga membutuhkan upaya untuk mengatasi hambatan maupun permasalahan tersebut. Dokumen ini diharapkan mampu memberikan informasi secara transparan mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pohon Kinerja RSUD Kota Yogyakarta



Lampiran 2 BA Desk Timbal Balik

1. Desk Timbal Balik Tribulan I

BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TRIBUNAN 1 TAHUN 2023

Pada hari ini Selasa tanggal 18 April 2023 bertempat di zoom meeting telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA), dengan hasil pencermatan sebagai berikut ini :


Jumlah Program	: 20
Jumlah Kegiatan	: 10
Jumlah Sub Kegiatan	: 20
Pagu Belanja Langsung	: Rp. 37.306.723.797,00
Capaian Realisasi Fisik	: 81.67
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5%	: 8
Capaian Realisasi Keuangan (%)	: 60.97
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10%	: 9

REKOMENDASI TW SEBELUMNYA	TINDAK LANJUT TW SEBELUMNYA	ASPEK	CATATAN	REKOMENDASI
1. Agar catatan tersebut dapat ditindaklanjuti pada tahun 2023 dan perbaikan perencanaan 2024 2. Agar dipertahankan atau ditingkatkan kinerja pada tahun berikutnya	Rencana perbaikan strategis dari tim penilai akreditasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing pokja terkait berikutnya	1. Perencanaan	1. Target sasaran dan program perangkat daerah untuk tahun 2023-2026 telah tertuang dalam file Reviu Renstra Tahun 2023 (Perubahan Pertama) pada tautan https://s.id/MetadataRPD 2. Perubahan ada pada nomenklatur indikator operasional BLUD menjadi presentase pendapatan BLUD rumah sakit.	Reviu digunakan pada: 1. Perbaikan input renja 2024 di SIPD; 2. Hasil dentrykan pada SIMONEVA ada TW IV tahun 2023; 3. Renja perubahan 2023.
1. Perencanaan target fisik dan keuangan sub kegiatan agar juga melihat realisasi tahun sebelumnya sebagai bahan pertimbangan, terutama untuk sub kegiatan yang sering mengalami deviasi negatif fisik dan keuangan 2) agar menyiapkan data target fisik untuk sub kegiatan TA 2022 sehingga siap untuk dientrikan di SIM pelaporan 2023	1. Output dan anggaran sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dan sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan pada tahun 2023 direncanakan lebih matang berdasarkan evaluasi kegiatan tahun 2022 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan kalibrasi alat kesehatan direncanakan dengan lebih baik pada tahun 2023 agar potensi capaian output fisik dan penyerapan anggaran secara bulanan lebih optimal	2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan	1) Pelaksanaan fisik kegiatan RSUD s.d Maret 2023 tercapai realisasi fisik 22.31%, ada beberapa sub kegiatan yang mengalami deviasi fisik di atas -5%, alasan keterlambatan pelaksanaan kegiatan sudah disampaikan di spreadsheet desktimbalbalik Bappeda tetapi ada beberapa yang belum diisi di kolom keterangan perkembangan pelaksanaan kegiatan di SIM Pelaporan	1) untuk kegiatan-kegiatan yang tertunda pelaksanaannya di tw 1 agar segera disusun jadwal ulang sehingga tidak mengganggu jadwal rencana kegiatan di bulan selanjutnya 2) pengisian keterangan di kolom perkembangan pelaksanaan keg di SIM Pelaporan jika terjadi keterlambatan mohon agar diisi alasan terjadinya keterlambatan
Koordinasi antar lini perlu dilakukan, proses SPJ disesuaikan tata kala dan di segerakan. Pelaksanaan sesuai aturan yang berlaku	Percepatan proses pengajuan dan kelengkapan SPJ apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan agar tidak terlalu banyak SPJ yang menumpuk dan dapat segera dibayarkan	3. Serapan Keuangan		
1. Perlu memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta 2. Apabila di Triwulan I Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, maka yang dapat dilakukan pelimpahan ke BPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang menggunakan jenis kontrak SPK 3. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ	1. Semua pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan RS dan tersedia di e-katalog LKPP (Lokal/Sektoral) telah dilakukan melalui metode e-purchasing 2. Pengadaan strategis dengan tender diusahakan secepat mungkin dilimpahkan ke BPBJ untuk menghindari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	4. Progress Pengadaan	Tidak terdapat Pengadaan Tender, Seleksi dan Pengadaan Langsung yang di limpahkan ke BPBJ untuk TW I 2023	1. Apabila di Triwulan II Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, maka yang dapat dilakukan pelimpahan ke BPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang menggunakan jenis kontrak SPK. 2. Perlu memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. pada pemilihan produk barang/ jasa pada E-Katalog perlu memperhatikan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 pasal E.2.a.1).b). 4. Apabila terdapat kebutuhan Pengadaan barang/ jasa yang bersifat rutin dan belum terakomodir pada E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta dapat Mengajukan Permohonan pencantuman Etalase. 5. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ.

mohon memperbaiki bagaian uraian permasalahan dalam form pengukuran kinerja	Bagian uraian permasalahan dalam form pengukuran kinerja telah disampaikan dengan lebih detil	5. Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja		
1. agar menyempurnakan catatan yang ada dalam evaluasi SAKIP 2021 sebagai bagian upaya penyempurnaan laporan SAKIP 2022 2. Memperhatikan catatan evaluasi atas PMPRB 3. agar melakukan update inputan capaian PDN jika masih diperlukan dengan koordinasi dengan Dinas Perindustrian 4. Menyempurnakan kekurangan terkait pelaksanaan MR antara lain Form C, Resiko Operasional (memperhatikan SE Walikota No 130.)	1. Catatan dalam evaluasi SAKIP 2021 telah ditindaklanjuti dan data dukung untuk kelengkapan SAKIP 2022 telah diupayakan selengkap dan seinformatif mungkin 2. Catatan evaluasi PMPRB telah diperhatikan dan dijadikan pedoman perbaikan 3. Setiap pengadaan P3DN yang dilaksanakan oleh RS telah dilakukan update serta input untuk meningkatkan capaian penggunaan PDN 4. Dalam penyusunan MR 2023 telah disempurnakan dengan berpedoman pada perwal nomor 43 tahun 2022 dan masukan dari inspektorat pada saat desk MR 2022	6. Pengawasan	1. terdapat 9 catatan dan rekomendasi atas penilaian RB tahun sebelumnya 2. terdapat 3 rekomendasi atas penilaian sakin tahun sebelumnya. penilaian sakin th 2022 masih dalam proses penilaian sehingga blm ada hasil penilaiannya. 3. terkait P3DN, pada sistem Siera tim BPKP sedang menyusun formulasi penghitungan , jika sudah siap dilakukan input nanti akan dilakukan sosialisasi. 4 catatan dari hasil evaluasi MR dapat di tindaklanjuti berupa perbaikan MR untuk tahun 2023 sesuai dengan perwal 43 tahun 2023, baik dalam hal pelaksanaan , pelaporan, pemantauan maupun pendokumentasiannya.	-agar rekomendasi RB dan Sakip yang ada bisa di tindaklanjuti, -agar OPD terus mengupdate capaian PDN. -catatan dari hasil evaluasi MR dapat di tindaklanjuti berupa perbaikan MR untuk tahun 2023 sesuai dengan perwal 43 tahun 2023.

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui

Perwakilan Perangkat Daerah

Tomi Suryo Ardyiono, A.Md

Perwakilan Tim Penguji	Instansi	TTD
Eni Kusrini, S.Si.	Bappeda	
Tarmini	Bag Adalbang	
Annisa Qhusnul Khasana	BLP	
Rohana Dian Puspasari	Inspektorat	

2. Desk Timbal Balik Tribulan II

BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TRIBUNAL 2 TAHUN 2023

Pada hari ini Kamis tanggal 13 Juli 2023 bertempat di zoom meeting telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA), dengan hasil pencermatan sebagai berikut ini :


Jumlah Program	: 20
Jumlah Kegiatan	: 10
Jumlah Sub Kegiatan	: 20
Pagu Belanja Langsung	: Rp. 85.006.593.425,00
Capaian Realisasi Fisik	: 87.07
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5%	: 7
Capaian Realisasi Keuangan (%)	: 63.81
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10%	: 12




REKOMENDASI TW SEBELUMNYA	TINDAK LANJUT TW SEBELUMNYA	ASPEK	CATATAN	REKOMENDASI
Reviu digunakan pada: 1. Perbaikan input renja 2024 di SIPD; 2. Hasil dientrykan pada SIMONEVA ada TW IV tahun 2023; 3. Renja perubahan 2023.	Hasil reviu telah digunakan untuk perbaikan input Renja Perubahan 2023 dan Renja 2024 pada aplikasi SIPD, hasil reviu akan di entry kan pada SIMONEVA TW IV 2023	1. Perencanaan	Ada 2 indikator program yang belum mencapai target TW II yaitu Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS, Operasional BLUD Rumah Sakit terpenuhi	1. Agar 2 indikator tersebut lebih diperhatikan pencapaiannya pada TW III dengan berfokus menguraikan permasalahan yang ada. 2. Agar ditambahkan catatan terkait SPM layanan medis RS dan komponen SPM yang belum dapat optimal.
1) untuk kegiatan-kegiatan yang tertunda pelaksanaannya di tw 1 agar segera disusun jadwal ulang sehingga tidak mengganggu jadwal rencana kegiatan di bulan selanjutnya 2) pengisian keterangan di kolom perkembangan pelaksanaan keg di SIM Pelaporan jika terjadi keterlambatan mohon agar diisi alasan terjadinya keterlambatan	1) Telah dilakukan berbagai upaya percepatan agar pelaksanaan pekerjaan yang tertunda bisa segera selesai. 2) Telah diinformasikan tentang tata cara pengisian realisasi dan perkembangan pelaksanaan pekerjaan pada SIM Pelaporan kepada PPTK sebagai penanggungjawab kegiatan.	2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan	1) Pelaksanaan fisik kegiatan RSUD s.d Juni 2023 tercapai realisasi fisik 55.91%, ada banyak (hampir semua) sub kegiatan yang mengalami deviasi fisik di atas -5%	1) kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan beserta solusi-solusinya segera diinventarisir dan dijadikan evaluasi untuk pelaksanaan pekerjaan di tahun depan agar tidak terjadi lagi atau jika terjadi lagi bisa diatasi lebih dini 2)Juntuk kegiatan-kegiatan yang tertunda pelaksanaannya di tw 2 agar segera disusun jadwal ulang sehingga tidak mengganggu jadwal rencana kegiatan di bulan selanjutnya
	Kelengkapan administrasi pembayaran diupayakan segera dilengkapi setelah proses pengadaan dan serah terima barang/jasa selesai dilaksanakan agar segera dapat dilakukan penerbitan SP2D	3. Serapan Keuangan	Penyerapan keuangan masih belum baik terkendala karena masih ada beberapa pekerjaan pihak ke3 yang masih mengalami keterlambatan pengajuan SPJnya. Untuk pengajuan SPJ GU masih kurang banyak volumenya.	Koordinasi internal di tingkatkan, proses verifikasi di tingkatkan dan disesuaikan dengan tatakala
1. Apabila di Triwulan II Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, maka yang dapat dilakukan pelimpahan ke BPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang menggunakan jenis kontrak SPK. 2. Perlu memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. pada pemilihan produk barang/ jasa pada E-Katalog perlu memperhatikan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 pasal E.2.a.1).b). 4. Apabila terdapat kebutuhan Pengadaan barang/ jasa yang bersifat rutin dan belum terakomodir pada E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta dapat Mengajukan Permohonan pencantuman Etalase. 5. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ.	1).Pengadaan langsung di RSUD kota Yogyakarta dilaksanakan oleh unit pengadaan yang dimiliki RSUD Kota Yogyakarta 2).Proses pengadaan barang dan jasa di RSUD telah dioptimalkan menggunakan e-purchasing maupun e-katalog lokal kota yogyakarta, selama barang/jasa yang tersedia dalam e-katalog tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan. 3). Pemilihan produk barang/jasa pada e-katalog telah memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri 4).Untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat rutin dan belum terakomodir dalam e-katalog lokal kami akan mengkomunikasikan kepada penyedia untuk memasukkan dalam e-katalog lokal. 5). Kendala dan permasalahan dalam proses pengadaan akan dikonsultasikan dengan BPBJ	4. Progress Pengadaan	Tidak terdapat Pengadaan Tender, Seleksi dan Pengadaan Langsung yang di limpahkan ke BPBJ untuk TW II 2023	1. Apabila di Triwulan III Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, maka yang dapat dilakukan pelimpahan ke BPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang menggunakan jenis kontrak SPK. 2. Perlu memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. pada pemilihan produk barang/ jasa pada E-Katalog perlu memperhatikan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 pasal E.2.a.1).b). 4. Apabila terdapat kebutuhan Pengadaan barang/ jasa yang bersifat rutin dan belum terakomodir pada E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta dapat Mengajukan Permohonan pencantuman Etalase. 5. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ.

	Laporan LKIP dan perjanjian kinerja akan disusun sesuai dengan mekanisme yang ada.	5. Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja	
-agar rekomendasi RB dan Sakip yang ada bisa di tindaklanjuti, -agar OPD terus mengupdate capaian PDN. -catatan dari hasil evaluasi MR dapat di tindaklanjuti berupa perbaikan MR untuk tahun 2023 sesuai dengan perwal 43 tahun 2023.	- Rekomendasi RB dan SAKIP telah ditindaklanjuti - Update capaian PDN telah dilakukan oleh unit pengadaan RSUD Kota Yogyakarta -Evaluasi MR telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan dalam berita acara evaluasi.	6. Pengawasan	- Nilai Evaluasi SAKIP RSUD sudah masuk kategori Memuaskan (A) - LHE AKIP sudah dikirim ke OPD dan terkait dengan TL rekomendasi hasil ev.AKIP, nantinya Inspektorat (Bid. Eko Kesra) akan membuat link khusus sehingga masing-masing OPD akan bisa mengupload bukti dukung atas TL tsb, untuk teknis dan linknya akan disampaikan melalui e- office ke setiap OPD. - RSUD sudah mengirim Lap realisasi penggunaan P3DN
			1.Rekomendasi Ev SAKIP 2023: a. Meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dengan tetap memperhatikan pencapaian sasaran.b. Meningkatkan pendokumentasian atas proses tindak lanjut rekomendasi dalam evaluasi kinerja berkala dengan melengkapi dokumentasi tindak lanjut dalam Berita Acara Desk Timbal Balik.c. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan pedoman PermenPAN Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Saran terkait Manajemen Risiko RSUD: a.Menyusun Dokumen Identifikasi dan Penilaian risiko pada tingkat program. b.Melakukan pengisian Dokumen Manajemen Risiko secara lebih cermat sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Pedoman Manajemen Risiko. c.Menguraikan target waktu pelaksanaan pengendalian secara spesifik. d.Mengidentifikasi risiko kemitraan dan risiko fraud pada tingkat strategis. e.Menjadikan nilai risiko residu tahun 2022 sebagai acuan dalam penilaian risiko yang sama pada tahun 2023. f.Mengoptimalkan penyusunan Dokumen Identifikasi dan Penilaian Risiko untuk Tahun 2023 untuk semua Bagian/Bidang. g.Merencanakan dan melaksanakan pengendalian yang efektif mengurangi risiko. 3. Saran terkait SPIP: Tetap menyusun Kertas Kerja manual dan kelengkapan bukti dukung untuk sampai dengan selesai tanggal31 Juli 2023

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui

Perwakilan Perangkat Daerah

Tomi Suryo Ardyiono

Perwakilan Tim Penguji	Instansi	TTD
Eni Kusrini, S.Si	Bappeda	
RIAN BANGUN H	BPKAD	
Tarmini	Bag Adalbang	
Irvan Satria Priambodo, S.Tr.T.	BLP	
Siwi C. Nugraha	Inspektorat	

3. Desk Timbal Balik Tribulan III

**BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBULAN 3 TAHUN 2023**

Pada hari ini Rabu tanggal 18 Oktober 2023 bertempat di zoom meeting telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA), dengan hasil pencermatan sebagai berikut ini :


Jumlah Program	: 20
Jumlah Kegiatan	: 10
Jumlah Sub Kegiatan	: 20
Pagu Belanja Langsung	: Rp. 118.820.482.880,00
Capaian Realisasi Fisik	: 96.53
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5%	: 4
Capaian Realisasi Keuangan (%)	: 77.66
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10%	: 10






REKOMENDASI TW SEBELUMNYA	TINDAK LANJUT TW SEBELUMNYA	ASPEK	CATATAN	REKOMENDASI
1. Agar 2 indikator tersebut lebih diperhatikan pencapaiannya pada TW III dengan berfokus menguraikan permasalahan yang ada. 2. Agar ditambahkan catatan terkait SPM layanan medis RS dan komponen SPM yang belum dapat optimal.	Terdapat 2 indikator program Operasional BLUD RS berupa capaian pendapatan sd TW II yang belum memenuhi target, akan diupayakan pencapaian targetnya pada TW IV tahun 2023 dan Indikator persentase tercapainya indikator SPM layanan RS diupayakan tercapai pada TW III 2023. Untuk target SPM yang belum tercapai optimal pada TW II 2023 sebanyak 13 SPM dari total 54 SPM pada TW III selanjutnya diupayakan tercapai.	1. Perencanaan	1. indikator persentase sarana prasarana dan peralatan kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat teroperasionalkan secara optimal belum dapat terpenuhi targetnya pada TW III	1. Agar dioptimalkan pelaksanaan kalibrasi alat keehatan yang diperlukan, sehingga target dapat dipenuhi pada TW IV 2. Untuk lebih eksplisit dalam memberikan narasi faktor pendorong pada indikator program dan sasaran.
1) kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan beserta solusi-solusinya segera diinventarisir dan dijadikan evaluasi untuk pelaksanaan pekerjaan di tahun depan agar tidak terjadi lagi atau jika terjadi lagi bisa diatasi lebih dini 2)Juntuk kegiatan-kegiatan yang tertunda pelaksanaannya di tw 2 agar segera disusun jadwal ulang sehingga tidak mengganggu jadwal rencana kegiatan di bulan selanjutnya	1). Telah dilakukan identifikasi masalah dan langkah-langkah penyelesaiannya sebagai evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun selanjutnya. 2). Kegiatan yang tertunda pada TW II telah selesai dilaksanakan pada TW III, terdapat kegiatan pemeliharaan yang masih belum selesai karena adanya kendala teknis penggantian suku cadang alat.	2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan	Pelaksanaan fisik kegiatan RSUD s.d September 2023 tercapai realisasi fisik 81.87%, masih ada beberapa sub kegiatan yang mengalami deviasi fisik di atas -5%	1)Jutk sub kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, belanja jasa kalibrasi alat kesehatan agar lebih intens berkoordinasi dengan LPFK sehingga untuk tahun kedepannya tidak mundur dari tatakala 2) kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan beserta solusi-solusinya segera diinventarisir dan dijadikan evaluasi untuk pelaksanaan pekerjaan di tahun depan agar tidak terjadi lagi atau jika terjadi lagi bisa diatasi lebih dini 3) untuk pekerjaan yang sudah/sedang dilaksanakan dengan pihak ketiga yang belum dientri datanya di laporan kontrak agar segera di entrikan di laporan kontrak SIM Pelaporan Dalbang 4) utk beberapa alat kesehatan yang belum diadakan karena belum menemukan penyedia yang sesuai dengan spesifikasi teknis alat yang dibutuhkan agar segera dipercepat proses pengadaannya mengingat sekarang sudah mundur di TW 4.
Koordinasi internal di tingkatkan, proses verifikasi di tingkatkan dan disesuaikan dengan tatakala	Dilakukan koordinasi intensif untuk memaksimalkan serapan keuangan sesuai tatakala yang sudah direncanakan	3. Serapan Keuangan	61,45 % adalah penyerapan keuangannya. Beberapa pekerjaan pihak ke3 lambat dalam penyerapan, mekanisme perlu di lakukan evaluasi internal. Pemahan akan aturan SPI perlu dipahami. Koordinasi dengan internal dan pihak3.	Perlu perhatikan SE langkah-langkah akhir tahun. Bisa terjadi resiko tidak terbayarkan apabila proses SPJ masih lambat.
1. Apabila di Triwulan III Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, maka yang dapat dilakukan pelimpahan ke BPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang menggunakan jenis kontrak SPK. 2. Perlu memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. pada pemilihan produk barang/ jasa pada E-Katalog perlu memperhatikan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 pasal E.2.a.1).b). 4. Apabila terdapat kebutuhan Pengadaan barang/ jasa yang bersifat rutin dan belum terakomodir pada E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta dapat Mengajukan Permohonan pencantuman Etalase. 5. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ.	1). Pengadaan langsung di RSUD kota Yogyakarta dilaksanakan oleh unit pengadaan yang dimiliki RSUD Kota Yogyakarta 2).Proses pengadaan barang dan jasa di RSUD telah dioptimalkan menggunakan e-purchasing maupun e-katalog lokal kota yogyakarta, selama barang/jasa yang tersedia dalam e-katalog tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan. 3). Pemilihan produk barang/jasa pada e-katalog telah memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri 4).Untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat rutin dan belum terakomodir dalam e-katalog lokal kami akan mengkomunikasikan kepada penyedia untuk memasukkan dalam e-katalog lokal. 5). Kendala dan permasalahan dalam proses pengadaan akan dikonsultasikan dengan BPBJ	4. Progress Pengadaan	Tidak terdapat Pengadaan Tender, Seleksi dan Pengadaan Langsung yang di limpahkan ke BPBJ untuk TW III 2023	1. Apabila di Triwulan IV Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, maka yang dapat dilakukan pelimpahan ke BPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang menggunakan jenis kontrak SPK. 2. Perlu memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. pada pemilihan produk barang/ jasa pada E-Katalog perlu memperhatikan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 pasal E.2.a.1).b). 4. Apabila terdapat kebutuhan Pengadaan barang/ jasa yang bersifat rutin dan belum terakomodir pada E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta dapat Mengajukan Permohonan pencantuman Etalase. 5. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ.

	Laporan LKIP dan perjanjian kinerja akan disusun sesuai dengan mekanisme yang ada.	5. Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja	Mohon menyusun pengukuran kinerja eselon Mohon menindaklanjuti rencana tindaklanjut pada form pengukuran kinerja dan melakukan monitoring keberhasilan rencana tindak.	Mohon menyusun pengukuran kinerja eselon Mohon menindaklanjuti rencana tindaklanjut pada form pengukuran kinerja dan melakukan monitoring keberhasilan rencana tindak.
<p>1.Rekomendasi Ev SAKIP 2023: a. Meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dengan tetap memperhatikan pencapaian sasaran.b. Meningkatkan pendokumentasian atas proses tindak lanjut rekomendasi dalam evaluasi kinerja berkala dengan melengkapi dokumentasi tindak lanjut dalam Berita Acara Desk Timbal Balik.c. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan pedoman PermenPAN Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Saran terkait Manajemen Risiko RSUD: a.Menyusun Dokumen Identifikasi dan Penilaian risiko pada tingkat program. b.Melakukan pengisian Dokumen Manajemen Risiko secara lebih cermat sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Pedoman Manajemen Risiko. c.Menguraikan target waktu pelaksanaan pengendalian secara spesifik. d.Mengidentifikasi risiko kemitraan dan risiko fraud pada tingkat strategis. e.Menjadikan nilai risiko residu tahun 2022 sebagai acuan dalam penilaian risiko yang sama pada tahun 2023. f.Mengoptimalkan penyusunan Dokumen Identifikasi dan Penilaian Risiko untuk Tahun 2023 untuk semua Bagian/Bidang. g.Merencanakan dan melaksanakan pengendalian yang efektif mengurangi risiko. 3. Saran terkait SPIP. Tetap menyusun Kertas Kerja manual dan kelengkapan bukti dukung untuk sampai dengan selesai tanggal31 Juli 2023</p>	<p>1). Rekomendasi RB dan SAKIP telah ditindaklanjuti 2). Evaluasi MR telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan dalam berita acara evaluasi. 3). Telah disusun kertas kerja manual dan telah disampaikan bukti dukung yang diperlukan</p>	<p>6. Pengawasan</p>	<p>1. BA Tindak Lanjut atas hasil evaluasi Lakip telah diterima beserta bukti TL-nya. 2. Laporan P3DN telah diterima per 5 Juli 2023 namun melebihi deadline yang ditetapkan yaitu 21 Juni 2023. 3. Proses evaluasi PANRB masih dalam tahap penyusunan laporan, mohon agar rekomendasi dapat ditindaklanjuti setelah laporan terbit. 4. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi MR 2023 serta Laporan Semester I perihal MR belum disampaikan.</p>	<p>RSUD agar menyampaikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi MR bersamaan dengan Laporan MR Semester I kepada Wali Kota ditermbuskan kepada Inspektorat sesuai prosedur yang tertuang dalam Perwal No.43/2022 tentang Manajemen Risiko.</p>

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui

Perwakilan Perangkat Daerah

Tomi Suryo Ardyiono, A.Md.

Perwakilan Tim Penguji	Instansi	TTD
Eni Kusriani, S.Si	Bappeda	
RIAN BANGUN H	BPKAD	
Tarmini	Bag Adalbang	
Irvan Satria Priambodo, S.Tr.T.	BLP	
Tri Wahyuningsih, SE	Bag Organisasi	
Anna Riki	Inspektorat	

4. Desk Timbal Balik Tribulan IV

**BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBUNAL 4 TAHUN 2023**

Pada hari ini Selasa tanggal 16 Januari 2024 bertempat di zoom meeting telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA), dengan hasil pencermatan sebagai berikut ini :


Jumlah Program	: 20
Jumlah Kegiatan	: 10
Jumlah Sub Kegiatan	: 20
Pagu Belanja Langsung	: Rp. 179.614.070.509,00
Capaian Realisasi Fisik	: 94.37
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5%	: 1
Capaian Realisasi Keuangan (%)	: 84.69
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10%	: 7



REKOMENDASI TW SEBELUMNYA	TINDAK LANJUT TW SEBELUMNYA	ASPEK	CATATAN	REKOMENDASI
1. Agar dioptimalkan pelaksanaan kalibrasi alat keehatan yang diperlukan, sehingga target dapat dipenuhi pada TW IV 2. Untuk lebih eksplisit dalam memberikan narasi faktor pendorong pada indikator program dan sasaran.	1. Kalibrasi alat kesehatan telah diupayakan secara maksimal dan telah selesai dilaksanakan sesuai target 2023 2. Faktor pendorong pada indikator program dan sasaran telah sesuai dengan kondisi di lapangan	1. Perencanaan	1. Realisasi indikator program Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS tidak sesuai antara Metadata dan Simoneva 2. Semua indikator sasaran dan indikator program di TW IV tercapai sesuai dengan target 3. Perencanaan murni 2023 sebesar 86,01M masih menggunakan skema pesimis, perubahan 2023 juga masih dipertahankan diangka ini mengingat pada bulan Juni 2023 realisasi pendapatan masih dibawah 50%. Berdasarkan desk TW IV realisasi pendapatan sebesar 95,96M (9,94M diatas target) dikarenakan adanya kelancaran pembayaran dari BPJS	1. Indikator program Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS mohon untuk disesuaikan dengan angka realisasi di Metadata 2. Agar pendapatan dioptimalkan untuk peningkatan layanan RSUD.
1) utk sub kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, belanja jasa kalibrasi alat kesehatan agar lebih intens berkoordinasi dengan LPFK sehingga untuk tahun kedepannya tidak mundur dari tatakala 2) kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan beserta solusi-solusinya segera diinventarisir dan dijadikan evaluasi untuk pelaksanaan pekerjaan di tahun depan agar tidak terjadi lagi atau jika terjadi lagi bisa dilatasi lebih dini 3) untuk pekerjaan yang sudah/ sedang dilaksanakan dengan pihak ketiga yang belum dientri datanya di laporan kontrak agar segera di entrikan di laporan kontrak SIM Pelaporan Dalbang 4) utk beberapa alat kesehatan yang belum diadakan karena belum menemukan penyedia yang sesuai dengan spesifikasi teknis alat yang dibutuhkan agar segera dipercepat proses pengadaannya mengingat sekarang sudah mundur di TW 4.	1. Upaya-upaya koordinasi terkait dengan proses pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan selalu dilakukan dengan intens baik dengan lembaga pemerintah maupun dengan penyedia jasa kalibrasi swasta. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya alat kesehatan yang tidak terkalibrasi sesuai dengan jadwalnya, namun terkadang masih terdapat kendala-kendala teknis diluar kendali RS sehingga masih terdapat proses kalibrasi yang terkadang mundur dari tatakala yang sudah direncanakan 2. Kendala-kendala pelaksanaan selalu dievaluasi secara berkala (minimal tribulanan) sehingga potensi-potensi keterlambatan bisa diminimalisir atau diantisipasi lebih awal 3. Telah diupayakan entri kontrak seoptimal mungkin oleh unit pengadaan terutama untuk pengadaan-pengadaan yang bersifat strategis agar dapat selalu termonitor pelaksanaan kontraknya 4. Upaya percepatan telah dilakukan untuk memperoleh penyedia yang dapat memenuhi spesifikasi alat kesehatan yang dibutuhkan oleh RS namun kendala teknis di lapangan seperti mekanisme import barang dan kendala-kendala lain dalam memperoleh alat kesehatan yang dialami oleh penyedia untuk mendatangkan alat tersebut berada diluar kendali RS	2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan	1. Pelaksanaan fisik kegiatan RS JOGJA s.d Desember 2023 tercapai realisasi fisik 98.19%, ada 2 sub kegiatan yang tidak selesai 100% yaitu sub kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2. pada sub kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, ada pekerjaan Instalasi Suction Sentral RS yang tidak terlaksana karena pengiriman 2 bulan (Desember-Januari) sehingga melewati tahun anggaran 3. pada sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, Beberapa alat kesehatan/kedokteran gagal dilakukan pembelian karena merupakan barang import dan inden lama, juga untuk pengadaan software treadmill gagal karena tidak mendapatkan kepastian dari vendor	1. dalam menyusun Perencanaan target fisik dan keuangan sub kegiatan agar juga melihat realisasi tahun sebelumnya sebagai bahan pertimbangan, terutama untuk sub kegiatan yang sering mengalami deviasi negatif fisik dan keuangan 2. untuk pekerjaan Instalasi Suction Sentral RS yang dianggarkan kembali di TA 2024 dengan sumber dana BLUD agar segera dimulai proses pengadaannya sehingga bisa segera mencapai target-target pelayanan RS yang ingin dicapai yang kemarin sempat tertunda 3. beberapa pengadaan yang mengalami kegagalan agar dijadikan evaluasi dan agar dihindari melakukan proses pengadaan di TW 4, sebaiknya proses pengadaan di plotting di awal hingga pertengahan tahun anggaran.
Perlu diperhatikan SE langkah-langkah akhir tahun. Bisa terjadi resiko tidak terbayarkan apabila proses SPJ masih lambat.	SE langkah-langkah akhir tahun selalu kami pedomani dalam proses pengajuan SPJ agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran. Namun terkadang proses masih lambat dikarenakan ada beberapa revisi yang diperlukan untuk pengajuan persyaratan pembayaran dikarenakan lokasi penyedia yang tidak seluruhnya berada di lokal DIY namun berada diluar daerah yang memperlambat proses administrasi (kelengkapan dokumen)	3. Serapan Keuangan		

<p>1. Apabila di Triwulan IV Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, maka yang dapat dilakukan pelimpahan ke BPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang menggunakan jenis kontrak SPK. 2. Perlu memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. pada pemilihan produk barang/ jasa pada E-Katalog perlu memperhatikan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 pasal E.2.a.1).b). 4. Apabila terdapat kebutuhan Pengadaan barang/ jasa yang bersifat rutin dan belum terakomodir pada E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta dapat Mengajukan Permohonan pencantuman Etalase. 5. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ.</p>	<p>1. Pada TW IV 2023 tidak terdapat pengadaan langsung yang dilimpahkan ke BPBJ 2. Upaya optimalisasi pengadaan melalui e-purchasing e-katalog lokal kota yogyakarta telah dilakukan salah satunya adalah dengan mengarahkan penyedia-penyedia lokal kota yogyakarta yang telah bekerjasama dengan RS untuk dapat memasukan/mendaftarkan produk barang/jasa yang dimiliki kedalam aplikasi e-purchasing LKPP 3. Untuk alat kesehatan produk dalam negeri yang sudah memiliki tingkat TKDN tinggi menjadi prioritas dalam pemilihan penyedia, selama produk tersebut mendapatkan rekomendasi dari user/pengguna alat kesehatan tersebut. Namun terkadang beberapa alat kesehatan yang berkaitan dengan patient safety dan life saving beberapa user masih menghendaki untuk menggunakan produk AKL yang memiliki teknologi yang lebih unggul dan lebih maju 4. Sudah diinformasikan kepada penyedia barang/jasa lokal yang secara rutin telah bekerjasama dengan RS agar mendaftarkan produknya ke dalam e-katalog lokal Yogyakarta 5. Konsultasi serta koordinasi selalu dilaksanakan oleh RSUD Kota Yogyakarta dengan BPBJ maupun OPD terkait dalam upaya mengatasi setiap kendala serta permasalahan dalam proses pengadaan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan.</p>	<p>4. Progress Pengadaan</p>		
<p>Mohon menyusun pengukuran kinerja eselon Mohon menindaklanjuti rencana tindaklanjut pada form pengukuran kinerja dan melakukan monitoring keberhasilan rencana tindak.</p>	<p>Rencana tindak lanjut dalam penyusunan pengukuran kinerja eselon telah ditindaklanjuti dan akan dilakukan monev secara berkala atas capaian keberhasilannya</p>	<p>5. Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja</p>		
<p>RSUD agar menyampaikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi MR bersamaan dengan Laporan MR Semester I kepada Wali Kota ditermbuskan kepada Inspektorat sesuai prosedur yang tertuang dalam Perwal No.43/2022 tentang Manajemen Risiko.</p>	<p>Rekomendasi hasil evaluasi MR akan segera ditindaklanjuti sesuai Perwal No.43/2022 tentang Manajemen Risiko</p>	<p>6. Pengawasan</p>		

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui

<p>Perwakilan Perangkat Daerah</p>

<p>Tomi Suryo Ardyiono</p>


Perwakilan Tim Penguji	Instansi	TTD
Eni Kusriani, S.Si	Bappeda	
Tarmini	Bag Adalbang	

Lampiran 3

Pengukuran Kinerja Tahun 2023 (SIMONEVA)


1. Indikator Sasaran 2023

Indikator Sasaran 2023



SIMONEVA
KOTA YOGYAKARTA

Senin, 15 Januari 2024 9:26:26


Tomio Suryo Ardyiono
Profile Logout

PENGUKURAN KINERJA

TW

Indikator Sasaran TW

Indikator Program TW

Sasaran Program TW

Ev RENJA Per TW

Sasaran Sub Kegiatan TW

Tahun

Perangkat Daerah


Nama Indikator Sasaran

+ Tambah

Aksi	No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Formula	Metodologi	Target/Satuan	Fisik TW 1	Fisik TW 2	Fisik TW 3	Fisik TW 4	Persen TW 1	Persen TW 2	Persen TW 3	Persen TW 4
	1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	50 poin	74,44	74,44	88,32	88,32	99,96	99,96	118,60	118,60
	2	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Skor Akreditasi RS	Hasil Penilaian Akreditasi RS yang dilakukan oleh KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit)	Skor Akreditasi RS dihitung dari Hasil Akreditasi Paripurna dari Standar Akreditasi Rumah Sakit Kemenkes RI (STARKES) yang terdiri dari 4 kelompok penilaian sebagai berikut: 1. Kelompok Manajemen Rumah Sakit terdiri atas: a. Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS) b. Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS) c. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) d. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) e. Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (MRMIK) f. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) g. Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan (PPK) 2. Kelompok Pelayanan Berfokus pada Pasien terdiri atas: a. Akses dan Kontinuitas Pelayanan (AKP) b. Hak pasien dan Keluarga (HPK) c. Pengkajian Pasien (PP) d. Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP) e. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB) f. Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO) g. Komunikasi dan Edukasi (KE) 3. Kelompok Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) 4. Kelompok Program Nasional (PROGNAS) Akreditasi dilakukan setiap 4 tahun sekali. Setiap tahun ada re akreditasi (PPS: Perencanaan Perbaikan Strategis), perencanaan perbaikan strategis menindaklanjuti rekomendasi yang dievaluasi Dinkes Kota, Dinkes DIY, dan KARS. Akreditasi terakhir tahun 2022 dengan hasil akreditasi paripurna (skor di atas 80 %)	80 %	93,27%	93,27%	93,27%	93,27%	116,58	116,58	116,58	116,58


Halaman 1 dari 1 | tampilkan 50 per halaman | 1 - 2 dari 2

2. Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



SIMONEVA
KOTA YOGYAKARTA

Senin, 15 Januari 2024 9:28:54



Tomio Suryo Ardyiono
Profile Logout

PENGUKURAN KINERJA

TW

Indikator Sasaran TW

Indikator Program TW

Sasaran Program TW

Ev RENJA Per TW

Sasaran Sub Kegiatan TW

Indikator Program Tahun 2023


Indikator Program Per Tahun



Tahun:

Perangkat Daerah:

Program:


[+ Tambah Indikator](#)

Aksi	No	Nama Program	Nama Indikator	Formula	Realisasi Fisik Thn Lalu	Target Fisik	Target Fisik Thn Depan	Realisasi TW 1	Realisasi TW 2	Realisasi TW 3	Realisasi TW 4	Tahun
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Operasional BLUD Rumah Sakit terpenuhi	(Realisasi pendapatan dibagi target pendapatan) kali 100	-	100	100	23.58%	49%	78.44%	111.56	2023

Aksi	No	Nama Program	Nama Indikator	Formula	Realisasi Fisik Thn Lalu	Target Fisik	Target Fisik Thn Depan	Realisasi TW 1	Realisasi TW 2	Realisasi TW 3	Realisasi TW 4	Tahun
 	1	(2327) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	Nilai SAKIP	A	A	A	A	A	A	A	2023


Halaman dari 1 | tampilkan per halaman | 1 - 1 dari 1

3. Indikator Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat




SIMONEVA
KOTA YOGYAKARTA


Senin, 15 Januari 2024 9:29:35




Tomio Suryo Ardyiono
Profile Logout




RESTRAN




Pengkura Kinerja




Input Data



Desk



Upload LKIP



Laporan

Indikator Program Tahun 2023


Indikator Program Per Tahun





Tahun: 2023

Perangkat Daerah: BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)

Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

[+ Tambah Indikator](#)

Aksi	No	Nama Program	Nama Indikator	Formula	Realisasi Fisik Thn Lalu	Target Fisik	Target Fisik Thn Depan	Realisasi TW 1	Realisasi TW 2	Realisasi TW 3	Realisasi TW 4	Tahun
	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan	((Nilai kelengkapan dokumen keperawatan + Skor persepsi pasien asuhan keperawatan + Nilai pelaksanaan asuhan keperawatan) : 3) x 100	-	80	83	0	92.46%	92.46%	93.41%	2023

Aksi	No	Nama Program	Nama Indikator	Formula	Realisasi Fisik Thn Lalu	Target Fisik	Target Fisik Thn Depan	Realisasi TW 1	Realisasi TW 2	Realisasi TW 3	Realisasi TW 4	Tahun
 	1	(2325) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasikan secara optimal	(Jumlah Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang terpelihara dan dapat dioperasikan secara optimal dibagi Jumlah Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang dikelola) x 100%	83.03	80.25	81	30%	54.41%	63.33%	80.97%	2023
 	2	(2326) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	(Jumlah Indikator SPM yang Tercapai dibagi Jumlah Indikator SPM Pelayanan Medis) x 100	-	80	83	75.9%	75.9%	88.88%		2023

Halaman 1 dari 1 | tampilkan 10 per halaman | 1 - 2 dari 2

4. Pengukuran Kinerja TW IV Tahun 2023

PENGUKURAN KINERJA
BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)
TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Triwulan IV			Keterangan	Program	Pagu	Triwulan IV		Unit Kerja	Keterangan
					Target	Realisasi	%				Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Skor Akreditasi RS	80 %		80% %	93.27% %	116.58	Penilaian akreditasi telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 dengan hasil sesuai target yaitu Lulus Paripurna. Status akreditasi paripurna berlaku selama 4 tahun sampai tahun 2026 dengan dilakukan evaluasi penilaian pada setiap tahunnya. Hasil evaluasi tahun 2023, mendapat visitasi dari Dinkes DIY dan Dinkes Kota untuk melakukan evaluasi atas capaian akreditasi, pada kunjungan evaluasi ini RSUD mendapat rekomendasi-rekomendasi yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2023	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	36.292.165.600,00	34.567.891.599,00	95.25	BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)	
										36.292.165.600,00	34.567.891.599,00	95.25	BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)	
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	50 poin		74,47 poin	88.32 poin	118.60	Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi atas kinerja tahun 2022 mendapatkan nilai 88.32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	143.321.904.909,00	117.550.107.490,00	82.02	BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)	
<p>Faktor Pendorong: =>Akreditasi RS harus dilakukan untuk memenuhi standar pelayanan berdasarkan peraturan yang berlaku =>Adanya kebutuhan untuk terus memperbaiki layanan kesehatan melalui perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai tuntutan masyarakat</p> <p>Uraian Permasalahan: =>Memerlukan persiapan yang panjang untuk menghadapi penilaian akreditasi terkait dengan optimalisasi sumberdaya yang dimiliki =>Tahun 2023 RSUD mendukung pelaksanaan RB general yang merupakan hal baru sehingga belum optimal pelaksanaannya. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung peningkatan reformasi birokrasi di RSUD akan tetapi belum terdokumentasi dengan baik</p> <p>Rencana Tindak Lanjut: =>Menjaga komitmen seluruh civitas hospitalia RS Jogja untuk mempertahankan nilai akreditasi paripurna =>Melakukan koordinasi intensif dan mendokumentasikan berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan data dukung penilaian RB</p>														



Lampiran 4
Matriks Tindak Lanjut SAKIP Tahun 2022

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022
RSUD Kota Yogyakarta

No.	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
1	Meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dengan tetap memperhatikan pencapaian sasaran	Akan diupayakan peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan dengan tetap memperhatikan pencapaian target sasaran sesuai dengan kebutuhan pelayanan RS	Meningkat	12 bulan	Direktur	Dalam proses
2	Meningkatkan pendokumentasian atas proses tindak lanjut rekomendasi dalam evaluasi kinerja berkala dengan melengkapi dokumentasi tindak lanjut dalam Berita Acara Desk Timbal Balik	Memastikan keterisian dan kelengkapan Data Monitoring dan Evaluasi dalam Berita Acara Desk Timbal Balik aplikasi SIMONEVA	100%	April, Juli, September 2023 dan Januari 2024	Direktur	Dalam proses
3	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Akan dilakukan Evaluasi Kinerja Internal secara Rutin dan Berkala	100%	Setiap Bulan	Direktur	Dalam proses

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 RSUD KOTA YOGYAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Standar Pelayanan RS Berbasis Mutu dan Keselamatan Pasien Meningkat	Skor Akreditasi RS	80% (Paripurna)
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 143.321.904.909,-	Perubahan APBD dan BLUD
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 36.292.165.600,-	Perubahan APBD
Jumlah Anggaran		Rp. 179.614.070.509,-	

Yogyakarta, 01 NOV 2023

Pj. Wali Kota Yogyakarta


SINGGIH RAHARJO, S.H., M.Ed

Direktur RSUD Kota Yogyakarta


dr. Aryudi Yunita, MMR
 NIP. [REDACTED]



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦫꦶꦠꦏꦺꦴꦲꦏꦂꦠꦏꦺꦴꦱꦺꦱꦺꦲꦠꦏꦺꦴꦩꦸꦩꦏꦺꦴꦠꦏꦺꦴꦲꦏꦂꦠ

Jl. Wiroseban No. 1 Yogyakarta Kode Pos : 55162 Telp. (0274) 371195 Fax (0274) 385769

EMAIL : rsud@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001, 081578600900 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : rumahsakitjogja.jogjakota.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ADMINISTRATOR
SETARA ESELON III TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marvy Yunita Dwi Riawati, SE.,M.Si
Jabatan : Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. Ariyudi Yunita, MMR
Jabatan : Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 2 November 2023

Pihak Kedua


dr. Ariyudi Yunita, MMR
NIP. [REDACTED]

Pihak Pertama


Marvy Yunita Dwi Riawati, SE.,M.Si
NIP. [REDACTED]

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ADMINISTRATOR
SETARA ESELON III TAHUN 2023
RSUD KOTA YOGYAKARTA**

No	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Program dan Kegiatan)	Target
1.	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Rumah Sakit Yang Mendukung Skor Akreditasi	Persentase Tata Kelola Rumah Sakit yang mendukung skor akreditasi	80%
2.	Terkelolanya BLUD Yang Menyediakan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan Pada Urusan Umum Dan Keuangan	1 Unit Kerja

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 10.097.271.610,-	APBD
	a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 5.890.000,-	APBD
	1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 5.890.000,-	APBD
	b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.736.000,-	APBD
	1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 5.736.000,-	APBD
	c. Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Rp 3.000.000,-	APBD
	1. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 3.000.000,-	APBD
	d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 423.455.610,-	APBD
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Rp 199.810.000,-	APBD
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp 223.645.610,-	APBD

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	7.737.860.000,-	APBD
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	2.401.200.000,-	APBD
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	5.336.660.000,-	APBD
f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1.896.330.000,-	APBD
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	33.360.000,-	APBD
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	62.970.000,-	APBD
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	120.000.000,-	APBD
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	1.680.000.000,-	APBD
g. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp	-	BLUD
1. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp	-	BLUD
Jumlah Anggaran	Rp	10.097.271.610,-	

Yogyakarta, 2 November 2023

Direktur RSUD Kota Yogyakarta

Wakil Direktur Umum dan Keuangan



dr. Ariyudi Yunita, MMR

NIP. [REDACTED]



Marvy Yunita Dwi Riawati, SE, M.Si

NIP. [REDACTED]

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ADMINISTRATOR
SETARA ESELON III TAHUN 2023
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

No	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Program dan Kegiatan)	Target
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah meningkat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)
2.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
3.	Terkelolanya BLUD Yang Menyediakan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan di Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1 Unit Kerja

Program/Kegiatan/SubKegiatan	Anggaran	Keterangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 11.626.000,-	APBD
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 5.890.000,-	APBD
1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 5.890.000,-	
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.736.000,-	APBD
1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 5.736.000,-	
c. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp -	BLUD
1. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp -	BLUD
Jumlah Anggaran	Rp 11.626.000,-	

Yogyakarta, 2 November 2023

Wakil Direktur Umum dan
Keuangan

Kepala Bagian Keuangan Perencanaan
Evaluasi dan Pelaporan


Marvy Yunita Dwi Riawati, SE, M.Si
NIP. [REDACTED]


Bambang Nugroho, SE, M.Sc., M.Ec.Dev., Ak.
NIP. [REDACTED]



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ꦑꦼꦩꦼꦫꦶꦠꦏꦺꦴꦩꦫꦏꦺꦴꦲꦏꦂꦠ
ꦢꦶꦤꦱꦺꦱꦺꦃꦠꦤ
ꦫꦸꦩꦱꦏꦶꦠꦸꦩꦸꦩꦢꦔꦫꦏꦺꦴꦲꦏꦂꦠ

Jl. Wiroabran No. 1 Yogyakarta Kode Pos : 55162 Telp. (0274) 371195 Fax (0274) 385789
EMAIL : rsud@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001, 081578600900 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : rumahsakitjogja.jogjakota.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PENGAWAS
SETARA ESELON IV TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pansunu Perwitasari, SE.,MPA
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Bambang Nugroho, SE.,M.Sc.,M.Ec.Dev., Ak.
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

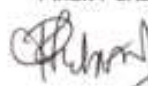
Yogyakarta, 2 November 2023

Pihak Kedua



Bambang Nugroho, SE.,M.Sc.,M.Ec.Dev., Ak.
NIP. [REDACTED]

Pihak Pertama



Pansunu Perwitasari, SE.,MPA.
NIP. [REDACTED]

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PENGAWAS
SETARA ESELON IV TAHUN 2023
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

No	Sasaran Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	12 Laporan
2.	Terkelolanya BLUD Yang Menyediakan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan di Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi	1 Unit Kerja

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.736.000,-	APBD
a. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 5.736.000,-	APBD
2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp -	BLUD
a. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp -	BLUD
Jumlah Anggaran	Rp 5.736.000,-	

Yogyakarta, 2 November 2023

Kepala Bagian Keuangan Perencanaan
Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Keuangan
dan Akuntansi




Bambang Nugroho, SE, M.Sc., M.Ec.Dev., Ak.
NIP. [REDACTED]

Pansunu Perwitasari, SE, MPA
NIP. [REDACTED]

Lampiran 6 Penerimaan Penghargaan Tahun 2023

1. Piagam Penghargaan Sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Pelayanan Prima” Tahun 2023;



2. Pemenang Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas dan RS di DIY Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Prov DIY;



3. Juara 1 Umum Gerak Jalan POR KOPRI KOTYA YK tahun 2023;



4. Juara 2 National Dialysis Education Competition ;



5. Prestasi Nominasi Terbaik Pelaporan Indikator Mutu RS Kelas B Tahun 2023 di DIY;



6. Penghargaan E Poster Award Korean Society Of Heart Failure (KSHF and CTC Asia 2023 Korsel untuk dr. Tyas Pramitasari dan dr. Sabila Fatimah;



7. Juara Pertama Lomba Senam Kreasi Hari Kesehatan Nasional ke 59 tingkat Unit Layanan Kesehatan Pemerintah Kota Yogyakarta;



8. Pemenang lomba karaoke kategori OPD Kota Yogyakarta;



9. Pemenang Gender Champion 2023 Aprilya Dewi Kartika Sari, M.Psi., Psikolog

